

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi selama kurun waktu tahun 2024. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI


Capt. Avrianto Suratno, S.Pd., M.M.,
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196511201990031001

	PERSETUJUAN	TANGGAL	PARAF
1	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI		
2	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA USAHA		
3	KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan perwujudan penyelenggaraan *clean government* dan *good governance*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 berisikan program dan kegiatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi selama kurun waktu tahun 2024. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran serta uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI


Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196511201990031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melaksanakan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2022-2024, yaitu sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan manajemen teknis yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendukung di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Keberhasilan capaian kinerja diukur berdasarkan tingkat capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Kebijakan Transportasi. IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari 15 indikator yang merupakan penjabaran dari 5 sasaran kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

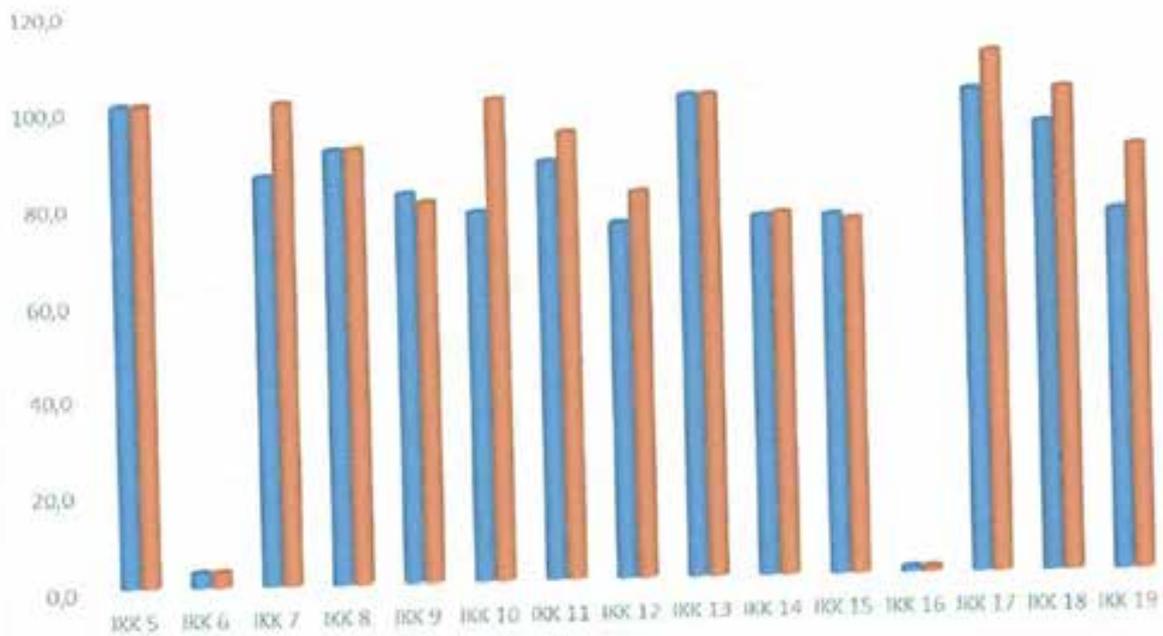
A. Pencapaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 cukup baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **105,92%**. Dari 15 IKK, terdapat 3 indikator yang belum mencapai target dan sisanya telah melampaui target kinerja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024. Gambaran kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dari tiap indikator selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. IKK 5 yaitu Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan ditargetkan pada PK tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 100,00. Nilai realisasi yang diperoleh sebesar 100,00 sehingga capaian kinerja untuk IKK 5 adalah sebesar 100,00%;
2. IKK 6 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi. Nilai realisasi berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen berdasarkan surat Nomor PS.302/4/6/ITJEN/2023 tentang Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kemenhub tanggal 14 Juni 2023, Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenhub Tahun 2022/2023 Nomor UM.006/22/1 Phb 2023 tanggal 27 Juni 2023, dan Hasil Evaluasi Penilaian oleh BPKP berdasarkan surat Direktur BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2024 ditargetkan mencapai level 3, sampai dengan akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar 3 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%;
3. IKK 7 yaitu Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2024 sebesar 85 dan diperoleh realisasi sebesar 100 sehingga capaian kinerja IKK 7 yaitu sebesar 117,65%;
4. IKK 8 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 90,2 dan telah terealisasi sebesar 90,39 sehingga capaian kinerja untuk IKK 8 adalah sebesar 100,21%;

5. IKK 9 yaitu Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2024 sebesar 81. Nilai realisasi merupakan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun 2024 sesuai Surat Itjen Nomor PS.302/7/2/ITJEN/2024 Tanggal 1 Agustus 2024. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 79,14 sehingga capaian kinerja untuk IKK 9 adalah sebesar 97,70%;
6. IKK 10 yaitu Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi. Pada tahun 2024 ditargetkan memperoleh nilai sebesar 77 dan telah terealisasi sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 diperoleh capaian kinerja sebesar 129,87%.
7. IKK 11 yaitu Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2024 dapat mencapai sebesar 87% dan telah terealisasi sebesar 92,86% sehingga capaian kinerja sebesar 106,73%;
8. IKK 12 yaitu Indeks Penyelenggaraan Perkantoran pada tahun 2024 ditargetkan memperoleh nilai sebesar 74. Telah terealisasi sebesar 80,46 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,73%.
9. IKK 13 yaitu Tingkat pemenuhan NSPK Badan Kebijakan Transportasi pada PK tahun 2024 ditargetkan memperoleh nilai sebesar 100% dan diperoleh realisasi sebesar 100 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%;
10. IKK 14 yaitu Indeks Kelembagaan ditargetkan pada PK tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 75,00. Telah terealisasi sebesar 75,59 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,79%. Penilaian Indeks Kelembagaan berdasarkan Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Seharusnya BKT baru akan melaksanakan evaluasi kelembagaan di tahun 2025, tetapi pada tahun 2023 Kementerian Perhubungan perlu melaksanakan evaluasi kelembagaan, sehingga organisasi dibawahnya juga diarahkan untuk melaksanakan Evaluasi Kelembagaan;
11. IKK 15 yaitu Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan memperoleh nilai sebesar 75, sampai dengan akhir tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 73,88 sehingga capaian kinerja untuk IKK 15 adalah sebesar 98,50%.
12. IKK 16 yaitu Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2024 memperoleh nilai indeks sebesar 0,96 telah terealisasi di tahun 2024 sebesar 0,92 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 96,04%.
13. IKK 17 yaitu Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan ditargetkan pada PK tahun 2024 memperoleh sebesar 100, telah terealisasi sebesar 107,95 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 107,95%;
14. IKK 18 yaitu Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data ditergetkan pada PK tahun 2024 sebesar 93 dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 107,53%;
15. IKK 19 yaitu Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi ditargetkan pada PK tahun 2024 dapat mencapai nilai 75 dan telah terealisasi sebesar 87,80 maka capaian kinerja diperoleh sebesar 117,06%.

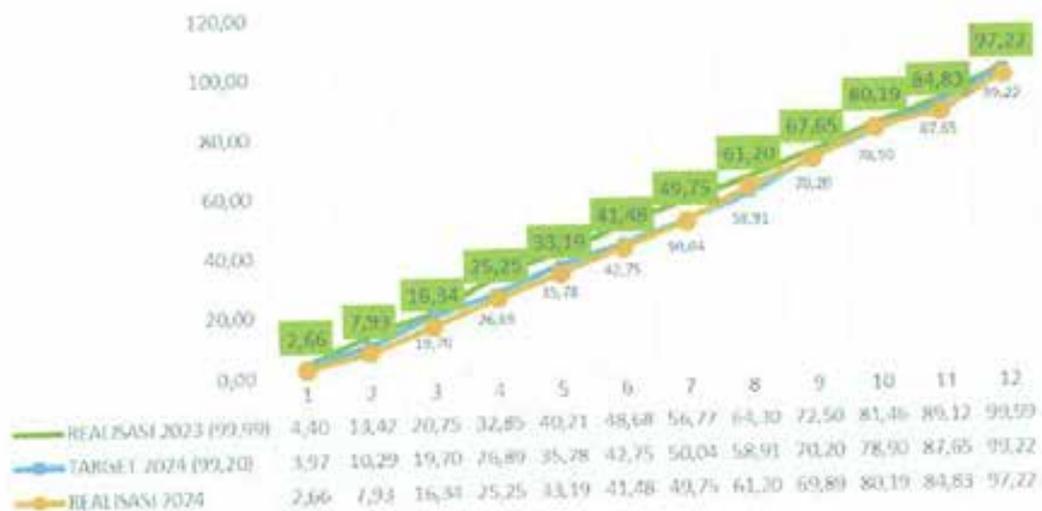
Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

B. Kinerja Anggaran

Secara umum realisasi serapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 sangat baik. Sisa belanja barang berasal dari sisa perjalanan dan honor jasa profesi serta sisa belanja pegawai dikarenakan adanya kelebihan perhitungan gaji dan tunjangan kinerja untuk pegawai disebabkan adanya mutasi pegawai dan pensiun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berikut di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	2
I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	3
I.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 – 2024.....	6
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024.....	9
II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	15
III.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	15
III.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (BENCHMARKING).....	71
III.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	72
III.5 REALISASI ANGGARAN.....	74
III.6 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA.....	79
BAB IV PENUTUP.....	82
IV.1 KESIMPULAN.....	82
IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	82
L A M P I R A N.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III.....	2
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	2
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	3
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 - 2024.....	8
Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan <i>Output</i> Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.....	11
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 3 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi.....	18
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	21
Tabel 3. 5 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada tahun berjalan Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 6 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel.....	23
Tabel 3. 7 Tingkatan Level Maturitas SPIP.....	23
Tabel 3. 8 Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan di Lingkungan Unit Eselon I Kementerian Perhubungan.....	24
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	25
Tabel 3. 10 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 11 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan.....	27
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	28
Tabel 3. 13 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan BKT Tahun 2024.....	29
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	32
Tabel 3. 15 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2024.....	32
Tabel 3. 16 Interpretasi Penilaian Hasil Evaluasi SPIP.....	33
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	34
Tabel 3. 18 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Nilai SAKIP BKT Tahun 2024.....	35
Tabel 3. 19 Rincian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2024.....	36
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	37

Tabel 3. 21 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2024..	38
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	43
Tabel 3. 23 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT Tahun 2024	44
Tabel 3. 24 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus <i>Slovin</i> dan Realisasi Responden.....	45
Tabel 3. 25 Skor Skala <i>Likert</i>	45
Tabel 3. 26 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala <i>Likert</i>	46
Tabel 3. 27 Interval Interpretasi Skor.....	47
Tabel 3. 28 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian	47
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	48
Tabel 3. 30 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2024	49
Tabel 3. 31 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT.....	49
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	51
Tabel 3. 33 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	52
Tabel 3. 34 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	52
Tabel 3. 35 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi.....	53
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi Tahun 2024, dan Target Tahun 2024	55
Tabel 3. 37 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2024.....	56
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	58
Tabel 3. 39 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2024	60
Tabel 3. 40 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi.....	60
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	61
Tabel 3. 42 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2024.....	62
Tabel 3. 43 Rekapitulasi Data Pemanfaatan <i>E-library</i> Perpustakaan Kementerian Perhubungan	63
Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	64
Tabel 3. 45 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2024.....	65

Tabel 3. 46 Daftar Aplikasi Tahun 2024	66
Tabel 3. 47 Daftar Data Produksi Tahun 2024.....	67
Tabel 3. 48 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024.....	68
Tabel 3. 49 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2024.....	69
Tabel 3. 50 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi.....	69
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024	70
Tabel 3. 52 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2024.....	70
Tabel 3. 53 Perkembangan Anggaran Tahun 2020-2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	74
Tabel 3. 54 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2024.....	76
Tabel 3. 55 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2024.....	77
Tabel 3. 56 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	iv
Gambar 2. Grafik Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	iv
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1
Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	10
Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	13
Gambar 2. 3 Perjanjian Kerja Revisi I Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	14
Gambar 3. 1 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi	28
Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	30
Gambar 3. 3 Nilai IKPA Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	31
Gambar 3. 4 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi	58
Gambar 3. 5 Nilai Efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sesuai Aplikasi SMART/ Monev Kemenkeu	72
Gambar 3. 6 Nilai Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai Aplikasi SMART/ Monev Kemenkeu	73
Gambar 3. 7 Nilai Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai Aplikasi SMART/ Monev Kemenkeu	73
Gambar 3. 8 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020 - 2024	75
Gambar 3. 9 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2020-2024	75
Gambar 3. 10 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	76
Gambar 3. 11 Penerimaan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	79
Gambar 3. 12 Peluncuran <i>E-Library</i> Terintegrasi	80

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	84
Lampiran 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya Terhadap Target Akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	86
Lampiran 3 Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Per-Triwulan Tahun Anggaran 2024	88

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean government and good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada Permen PAN-RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Capaian kinerja untuk beberapa Indikator yang masih terkait fungsi penelitian dan pengembangan telah dihilangkan sehubungan dengan adanya peralihan anggaran maupun tugas dan fungsi kelitbangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per bulan Agustus 2022.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 - 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BLT 65 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-SBKT 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan Badan Kebijakan Transportasi maupun dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan tetap terintegrasi.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan bagian integral dari Badan Kebijakan Transportasi dalam lingkup Kementerian Perhubungan. Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berpedoman pada Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2022 - 2024 dan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2022 - 2024

yang telah disusun dan dijadikan dasar analisa capaian Kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perhubungan. Karenanya maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi selaku Pemberi Mandat atas pencapaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan manajemen teknisnya dalam penyelenggaraan program kegiatan;
- c. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

I.2.1 Tugas

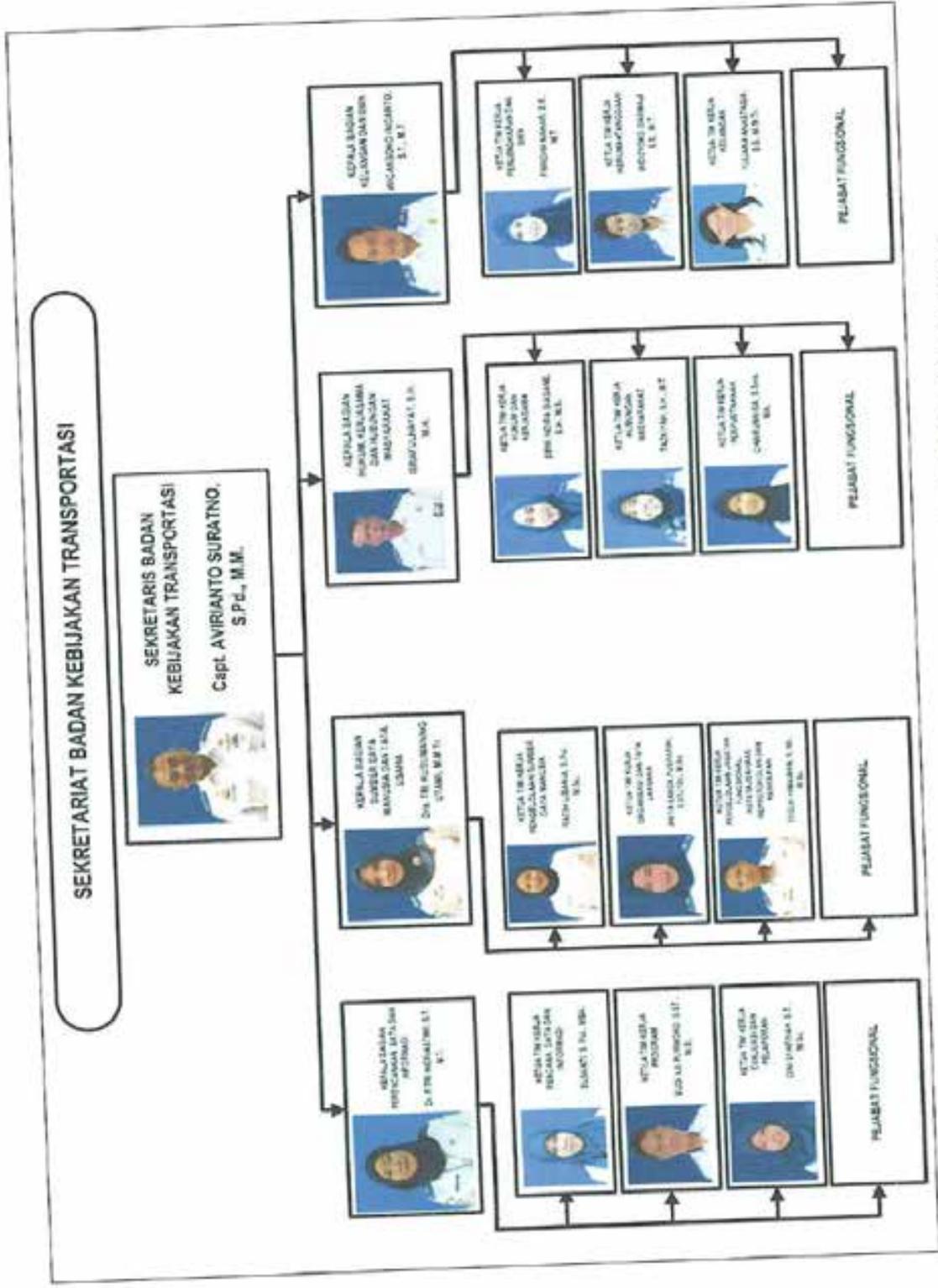
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Sekretaris Badan, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

I.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Rencana, Program, Anggaran, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- b. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatausahaan, Serta Pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Analisis Kebijakan dan Kepustakaan;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Hukum, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Publikasi, Serta Dokumentasi Dan Kepustakaan; dan
- d. Penyiapan Pelaksanaan Urusan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Serta Kerumahtanggaan.

Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melingkupi 4 (empat) unit kerja Eselon III yang terdiri dari (1) Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; (2) Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; (3) Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan (4) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Apabila digambarkan maka struktur organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan PM 17 Tahun 2022 sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Komposisi pegawai PNS Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan unit kerja eselon III, tingkat pendidikan serta golongan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2024 yaitu 95 pegawai yang terdiri dari 87 orang PNS dan 8 orang Pegawai Kontrak. Seluruh pegawai ini tersebar pada empat unit kerja eselon III. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan unit kerja ditampilkan pada table berikut ini.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon III

NO	UNIT KERJA ESELON III	PNS	PPPK
1	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	23	4
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	16	2
3	Bagian Keuangan dan BMN	26	0
4	Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	22	2
Total		87	8

Sumber: *Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Januari 2025*

2. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menurut tingkat pendidikan, yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 24 orang, S1/DIV sebanyak 54 orang, DIII sebanyak 10 orang, DI sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 5 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA ESELON III	S3	S2	S1/DIV	D-III	D-I	SMA
1	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	1	6	18	2	-	-
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	-	5	10	3	-	-
3	Bagian Keuangan dan BMN	-	5	14	3	1	3
4	Bagian Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	-	8	12	2	-	2
Total		1	24	54	10	1	5

Sumber: *Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, Januari 2025*

3. Berdasarkan Golongan

Sedangkan berdasarkan golongan tercatat pegawai Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 67 orang, Golongan IX sebanyak 7 orang, Golongan VII sebanyak 1 orang, dan Golongan II sebanyak 11 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA ESELON III	IV	III	IX	VII	II
1	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	3	19	4	0	1
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	2	12	1	1	2
3	Bagian Keuangan dan BMN	2	17	0	0	7
4	Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2	19	2	0	1
Total		9	67	7	1	11

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Januari 2025

1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Pada tahun 2022, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Tugas utama yang sebelumnya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perhubungan dengan output hasil penelitian berubah menjadi menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan masukan penyempurnaan kebijakan transportasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Perubahan tugas pokok dan fungsi ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi ke depan untuk kurun waktu 2020-2024. Adapun peran Badan Kebijakan Transportasi ke depannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Kebijakan Transportasi meliputi penjabaran peran Badan Kebijakan Transportasi terkait dengan fungsi pelayanan Badan Kebijakan Transportasi. Peran Badan Kebijakan Transportasi kedepannya diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai:

1. Lembaga yang menyusun kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Lembaga pelaksana analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Lembaga pelaksana analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
4. Lembaga pengelola manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
5. Lembaga pelaksana pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;

6. Lembaga pelaksana pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Lembaga pelaksana administrasi Badan Kebijakan Transportasi; dan
8. Lembaga pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi meliputi kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Perubahan organisasi Badan Litbang Perhubungan menjadi BKT berimplikasi langsung pada kebutuhan perubahan seluruh perangkat pendukung organisasi, meliputi aspek pola pengorganisasian, aspek sumber daya manusia, aspek hubungan kelembagaan internal dan eksternal serta aspek penganggaran. Pada proses restrukturisasi organisasi, pola pengorganisasian diwujudkan dalam bentuk perangkat kelembagaan dan tata laksana yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mengatur hubungan kerja (koordinasi, kolaborasi dan sinergi) antar fungsi unit organisasi atau unit kerja. Perumusan tata laksana, yaitu dalam bentuk proses bisnis meliputi hubungan tata acara kerja, kesepakatan operasional kerja (sistem kerja) dan Standar Prosedur Operasional (SOP).

Sementara itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi lebih bersifat internal dan bersifat dukungan manajemen, yaitu meliputi kegiatan pokok penyiapan rencana, program, anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data dan sistem informasi, penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatausahaan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepustakaan, penyiapan pelaksanaan urusan hukum, kerjasama, hubungan masyarakat, publikasi, serta dokumentasi dan kepustakaan; serta penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta kerumahtanggaan.

Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan capaian dari kegiatan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan dan pengembangan perhubungan.

Dalam hal ini, peran strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai koordinator pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan khususnya sumber daya manusia meliputi tenaga fungsional tertentu serta kegiatan penunjang yang terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung rekomendasi kebijakan.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

BAB II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024, yaitu terdiri dari:

- a. Tahapan Pengukuran Kinerja
- b. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun 2024, pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya.
- c. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya (*Benchmarking*)
- d. Analisis Efisiensi Sumber Daya
- e. Realisasi Anggaran
Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.
- f. Capaian Keberhasilan Lainnya

BAB IV – Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 - 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan tersebut, Rencana strategis (Renstra) Badan Kebijakan Transportasi telah disusun dan disahkan pada bulan Desember tahun 2022.

Transformasi Badan Litbang menjadi BKT mendasari penyempurnaan/penyesuaian dalam melakukan evaluasi/Reviu Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020-2024 menjadi Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 yang dipergunakan sebagai pedoman dan acuan perencanaan bagi Unit Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi untuk (1) penyusunan dan penetapan rencana lima tahun (Renstra); (2) penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL); (3) pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; dan (4) pemantauan dan evaluasi di bidang perumusan rekomendasi kebijakan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan digunakan oleh para pemangku jabatan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasinya. Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024 merupakan turunan dari Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024.

Berikut ini merupakan gambaran visi dan misi serta tujuan dari Badan Kebijakan Transportasi sebagai organisasi baru yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Nantinya, dalam menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi akan mengacu kepada visi dan misi serta tujuan dari Badan Kebijakan Transportasi ini yang disusun berdasarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Berikut ini Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi dalam dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi:

VISI

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

MISI

Sebagai penjabaran visi tersebut maka misi Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan **harmonisasi** kebijakan transportasi secara **holistik, integratif, tematik, spasial (HITS)**;
2. Meningkatkan **kualitas** rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*evidence and knowledge based policy*);
3. Meningkatkan **peran serta pemangku kepentingan** dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
4. Membangun **bisnis proses** yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi;
5. **Penguatan** SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

TUJUAN

1. Terwujudnya peran sentral Badan Kebijakan Transportasi dalam perumusan kebijakan transportasi;
2. Terwujudnya dukungan Badan Kebijakan Transportasi untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024 dan Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024. Pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran kegiatannya, setiap sasaran yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Efektif;
2. Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi;
4. Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi;
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi.

Secara rinci penjabaran indikator kinerja berikut targetnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 - 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	100	100
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3
IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	82	84	85
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	86,2	88,2	90,2
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	80	81	82*
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	75	76	77
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	85	86	87
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	72	73	74
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	90	95	100
IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79	79,5	80*
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	73	74	75
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,92	0,96	1*
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	70	75	75*
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	92	93
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	70	75	75

Target kinerja selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir periode Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terdapat penyesuaian target pada IKK 9, IKK 14, IKK 16, dan IKK 17 di tahun 2024 karena adanya transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi yang menyebabkan ketidaksesuaian dokumen yang berdampak pada target dengan realisasi. Perubahan target ini dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga terdapat perbedaan antara target akhir periode Renstra dan target PK 2024.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Rencana kinerja ini dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, guna mempermudah mengaitkannya dengan pengeralahan sumber daya, terutama anggaran.

Pada tahun 2024, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp75.642.991.000 dari total pagu alokasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi Rp164.691.139.000,-. Pada bulan November dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 menjadi sebesar Rp74.854.518.000,-. Setelah pengesahan realokasi anggaran ke Babun, DIPA akhir Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp74.854.518.000,-. Rincian anggaran meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 34.805.083.000,-, belanja barang Rp 36.277.009.000,-, dan belanja modal sebesar Rp 3.772.426.000,-. Dalam hal ini, dokumen RKT Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi 2023 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 menjadi dasar penentuan alokasi anggaran tahun 2024.



RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
TAHUN 2024

KODE	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/OK)	KODE	INDIKATOR KINERJA (IKP/IKK)	SATUAN	2024
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berkeadilan	IKP 4	Sisa Indeks RP Kementerian Perhubungan	Indeks	80,5
OK 3	Meningkatnya Kinerja RKT yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Mutu Jasa SP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Pemantauan RKT	Indeks	80
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan RKT	Indeks	90,2
		IKK 9	Nilai AKOP RKT	Nilai	82
		IKK 10	Indeks Pengeloaan BSN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	77
		IKK 11	Indeks Pelaksanaan Kerjasama dan Sinergi RKT	%	87
OK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Badan RKT	IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perencanaan	Indeks	74
		IKK 13	Tingkat penyelesaian Norma, Standar, Prosedur, Kebijakan RKT	%	100
OK 5	Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan SDM RKT	IKK 14	Indeks Kinerja Organisasi RKT	Indeks	80
		IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN RKT	Indeks	73
		IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen SDM RKT	Indeks	7
OK 6	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik RKT Perhubungan	IKK 17	Tingkat pengeloaan layanan pemerintahan	Skor	75
		IKK 18	Tingkat Pengeloaan Aplikasi dan Data	Skor	81
		IKK 19	Tingkat Pengeloaan Publikasi dan Komunikasi Kebijakan Transportasi	Skor	77

Jakarta, November 2023

SEKRETARIS
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PANDU YUNANTO, ATD., M.Eng. Sc.
NIP. 196506061988031001

Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Pada tahun 2022 dengan adanya restrukturisasi program Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2022 berimplikasi terhadap restrukturisasi output dan kegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut. Restrukturisasi output ini pada tahun 2024 sudah mulai diakomodir dengan adanya penyusunan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA RENJA) melalui penyederhanaan output dimana beberapa output lama dikelompokkan menjadi output baru. Secara rinci pemetaan kegiatan output baru dan output lama dapat dilihat Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2. 2 Pagu Anggaran Berdasarkan *Output* Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
1. Formulasi Kebijakan Transportasi	1. Koordinasi	1. Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan	29.480.343.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	2. Layanan Dukungan Manajemen Internal	2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.810.131.000
3. Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3. Layanan Sarana Internal	3.340.914.000
		4. Layanan BMN	1.246.661.000
	4. Layanan Dukungan Manajemen Internal	5. Layanan Umum	1.324.538.000
		6. Layanan Perkantoran	63.140.804.000
		7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	870.149.000
	5. Layanan Manajemen Kinerja Internal	8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	182.392.000
		9. Layanan Manajemen Keuangan	1.359.572.000
		10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	176.628.000
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan	6. Layanan Manajemen Kinerja Internal	11. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	427.066.000
		12. Layanan Data dan Informasi	212.044.000
5. Legislasi dan Litigasi Kebijakan	7. Layanan Dukungan Manajemen Internal	13. Layanan Hukum	95.172.000
TOTAL			103.666.414.00

II.3 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan target kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang akan dicapai pada tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak kerja antara Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Pada tahun 2024, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun sebanyak 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja awal yang disusun pada bulan Januari 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp97.820.829.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.;
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja revisi I yang disusun pada bulan Juli 2024 dikarenakan adanya pergantian Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi serta adanya *refocusing* anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp103.666.414.000,- yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Revisi I inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1.	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Ekstrol	IKK 5 Pencapaian Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselaraskan pada Tahun Bojolan	%	100
2.	SK 3 Meningkatnya Efektivitas Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturnitas SPiP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7 Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	85
		IKK 8 Indeks Pengeluaran Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	90,2
		IKK 9 Nilai SAMIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10 Indeks Pengeluaran BKM Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	77
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	87
		IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perumusan	Indeks	74
3.	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	100
4.	SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Kolaborasi Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	75
		IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	75

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1		IKK 16 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	8,96
5	SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Pengumpulan Aplikasi dan Data	Nilai	100
		IKK 18 Tingkat Pengolahan Aplikasi dan Data	Nilai	53
		IKK 19 Tingkat Pengolahan Publikas Rekonstruksi Kebijakan Transportasi	Nilai	75

ANGGARAN

KEGIATAN
Program Infrastruktur Konektivitas
Rp. 23.634.755.000,00

1. Komunitas Kebijakan Transportasi
Program Dukungan Manajemen
Rp. 1.810.131.000,00

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perintis
Rp. 71.941.858.000,00

2. Perencanaan, Keuangan, BHM, dan Umum
Rp. 639.110.000,00

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
Rp. 55.172.000,00

4. Legalitas dan Litigasi Kebijakan
Rp. 55.172.000,00

Jakarta, Januari 2024

Ditujukan
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

Subdit
Badan Kebijakan Transportasi

GAG. ARIYANTO S., S.Pd., M.M.
Pemula Utama Markas (PUM)
NIP. 19951123 199003 1 001

Dr. RIZKIYU KURNIAWATI, S.STP., M.Si
Pemula Utama Markas (PUM)
NIP. 19760925 199802 1 002

Gambar 2. 2 Perjanjian Kerja Awal Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1.	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5 Peningkatan Peran serta Badan Kebijakan Transportasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Transportasi	%	100
2.	SK 3 Meningkatnya Kualitas Bauran Kebijakan Transportasi yang Akumulatif	IKK 6 Tingkat Mutu dan Ship Terintegrasi IKK 7 Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi IKK 8 Indeks Pengelolaan Kebijakan Transportasi IKK 9 Nilai SAKSI Badan Kebijakan Transportasi IKK 10 Indeks Pengelolaan BUMD Badan Kebijakan Transportasi IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Badan Kebijakan Transportasi IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perairan	Level Indeks Indeks Nilai Indeks %	3 85 80,2 81 77 87
3.	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kabupaten, Regulasi dan Hukum Badan Kebijakan Transportasi	IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kerja Badan Kebijakan Transportasi	%	100
4.	SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Kebijakan Transportasi	IKK 14 Indeks Keterampilan Badan Kebijakan Transportasi IKK 15 Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks Indeks	75 75

SK	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Aplikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	IKK 17 Tingkat Pengolahan Layanan Perhubungan IKK 18 Tingkat Pengolahan Aplikasi dan Data IKK 19 Tingkat Pengolahan Aplikasi dan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	100 92 75
----	--	--	-------	-----------------

ANGGARAN

- KEGIATAN**
- Program Infrastruktur Konektivitas**
1. Fasilitasi Kebijakan Transportasi Rp 20.480.343.000,00
- Program Dukungan Manajemen**
1. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Rp 1.810.131.000,00
 2. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Rp 71.641.658.000,00
 3. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Rp 680.110.000,00
 4. Layanan dan Logistik Manajemen Rp 95.172.000,00

Disediakan
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

[Signature]

Dr. BOBBI KURNIAWATI, S.STP., M.P.
Nombona Uluwu (Wali)
NIP. 19760628 199602 1002

Jakarta, Juli 2024
Gubernur
Badan Kebijakan Transportasi

Dik. AYU BAWO, S. B. 24. M.M.
Perdana Lampa Uluwu (Wali)
NIP. 19651125 199003 1 001

No	Posisi	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Ditanggung Jawab	Dr. Syarifah, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Baku dan Peningkatan Mutu Badan Kebijakan Transportasi	<i>[Signature]</i>
2.	Spesialis	Rizka Nurul, S.P., M.Sc.	Manajer Bagian Peningkatan Mutu dan Informasi	<i>[Signature]</i>
3.	Ditanggung Jawab	Dedi, Arifanto, S. Fiq. M.M.	Seorang Badan Kebijakan Transportasi	<i>[Signature]</i>

Gambar 2. 3 Perjanjian Kerja Revisi I Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yaitu *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian realisasi target *output* kegiatan, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap bulan. Di samping Laporan Rencana Aksi Kinerja, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan monitoring capaian target dan proses output/kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi e-monev penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3> dalam bentuk monitoring realisasi target anggaran dan output kegiatan.

III.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi 1 Tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024 dengan realisasinya.

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target PK tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024;
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya;
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target ditahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024.

III.2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai upaya pencapaian program Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi yang dijabarkan menjadi 15 indikator kinerja kegiatan. Secara rata-rata capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 adalah sebesar **105,92%** yang dihitung dari capaian seluruh indikator Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	100,00	100,00%
2	SK 3 Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3,00	100,00%
		IKK 7 Indeks Perencanaan BKT	Indeks	85	100,00	117,65%
		IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	90,2	90,39	100,21%
		IKK 9 Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	79,14	97,70%
		IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	77	100,00	129,87%
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	87	92,86	106,73%
		IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	74	80,46	108,73%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
3	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	100	100,00	100,00%
4	SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	75	75,59	100,79%
		IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	75	73,88	98,50%
		IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,92	96,04%
5	SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	100	107,95	107,95%
		IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	93	100,00	107,53%
		IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	87,80	117,06%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)							105,92

Secara rinci, analisis realisasi capaian dan target tahun 2024 pada masing-masing sasaran dan indikator disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 2: Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif

Pencapaian sasaran kegiatan dua diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2024	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	100,00	100,00%

IKK 5: Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan

Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan diselenggarakan melalui koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif. Koordinasi perumusan kebijakan meliputi koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, dan koordinasi monitoring evaluasi.

Persentase penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif pada tahun berjalan dihitung berdasarkan:

Koordinasi perencanaan (a)	Koordinasi perencanaan kebijakan dan pemetaan isu strategis; dilakukan minimal 2 kali setahun bersama dengan <i>stakeholder</i> terkait (agenda mapping dilaksanakan per semester)
Koordinasi pelaksanaan (b)	Koordinasi pelaksanaan kebijakan, mencakup kegiatan konsultasi publik, harmonisasi rancangan kebijakan dan sosialisasi kebijakan, dilakukan minimal 5 kali setahun bersama dengan <i>stakeholder</i> terkait (2x konsultasi publik dan sosialisasi rancangan kebijakan) (3 kali harmonisasi rancangan regulasi per 4 bulan yang telah siap ditetapkan)
Koordinasi monitoring evaluasi (c)	Koordinasi monitoring, kendali mutu dan evaluasi implementasi kebijakan, dilakukan minimal 2 kali setahun, sebagai monitoring dan evaluasi saat rumusan kebijakan telah di deliver (diawal dan akhir tahun)
Total koordinasi (d)	Minimal 9 x (angka minimal pembagi)

Pengukuran capaian kinerja Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan diperoleh berdasarkan jumlah koordinasi yang dilaksanakan meliputi koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan koordinasi monitoring evaluasi dibagi dengan total koordinasi (minimal 9 kali dalam setahun).

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 16 Kegiatan Koordinasi Perencanaan, 22 Koordinasi Pelaksanaan, dan 7 Koordinasi Monitoring Evaluasi. Berikut ini merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung Perumusan Kebijakan Transportasi:

- a. Kegiatan koordinasi perencanaan antara lain:
- 1) *Kick-Off Agenda Mapping* Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024, Palembang (7 Februari 2024);
 - 2) Strategi Kebijakan Konektivitas Sarana Transportasi di Daerah Perbatasan Kalimantan Utara Guna Mewujudkan Transportasi Nasional yang Handal, Terjangkau, Berkeadilan dan Berkelanjutan, Kalimantan Utara (29 Februari 2024);
 - 3) Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sub Sektor Transportasi Udara dan Perkeretaapian di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (5 Maret 2024);
 - 4) Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Skema *Buy The Service* sebagai Upaya Reformasi Sistem Transportasi Publik Perkotaan, Bandung-Jawa Barat (14 Maret 2024);
 - 5) Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik yang Berkeselamatan di Wilayah DKI Jakarta, Jakarta (19 Maret 2024);
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sektor Transportasi serta Agenda Mapping di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (20 Maret 2024);
 - 7) Optimalisasi Sarana Transportasi Guna Mewujudkan Peranan Kalimantan Tengah sebagai Sentral Konektivitas di Pulau Kalimantan Tengah melalui Perencanaan Pusat dan Daerah yang Terpadu, Palangkaraya (25 April 2024);
 - 8) Upaya Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo (8 Mei 2024);
 - 9) Sinkronisasi Kebijakan Transportasi dalam Mendukung Potensi Kepulauan Riau sebagai Pusat Logistik Regiona I, Tanjung Pinang (16 Mei 2024);
 - 10) Strategi Kebijakan Peningkatan Peranan Sektor Transportasi di Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Nasional yang Handal, Terjangkau, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, Jambi (21 Mei 2024);
 - 11) Implementasi 4 (Empat) Undang-Undang di Bidang Transportasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah, Bali (22 Mei 2024);
 - 12) Strategi Kebijakan Peningkatan Peranan Sektor Transportasi di Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Nasional yang Handal, Terjangkau, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, Lampung (28 Mei 2024);
 - 13) Optimalisasi Sarana Transportasi Guna Mewujudkan Peranan Sulawesi Selatan Sebagai Sentral Konektivitas di Pulau Sulawesi Melalui Perencanaan Pusat dan Daerah Yang Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, (31 Mei 2024);
 - 14) Mapping Isu Strategis terkait Peningkatan Konektivitas Transportasi yang Berkeselamatan di Provinsi Maluku Utara, Ternate (6 Juni 2024);
 - 15) Mapping Isu Strategis terkait Efektivitas Kebijakan Pemberian Subsidi Angkutan Umum pada Transportasi Berbasis Jalan dan Kereta Api, Yogyakarta (13 Juni 2024);
 - 16) Mapping Isu Strategis terkait Penyusunan Kerangka Kebijakan Transportasi Cerdas Terintegrasi untuk Mobilitas Berkelanjutan dan Efisien di Kota Cerdas, Surabaya (21 Juni 2024).

- b. Kegiatan koordinasi pelaksanaan yang meliputi konsultasi public dan sosialisasi kebijakan serta harmonisasi rancangan antara lain:
- 1) Focus Group Discussion Perumusan Kebijakan Mengenai Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Makassar (18 Juli 2024);
 - 2) Konsultasi Publik Rekomendasi Kebijakan Transportasi Penyangga IKN dan Standar Fasilitas Integrasi Moda di KIPP IKN, Balikpapan (16 Juli 2024);
 - 3) Memberdayakan Ekosistem Transportasi Seaplane dan SeaWIG (*Wing In Ground*) dalam Rangka Menunjang Ekowisata di Indonesia, Batam (1 Agustus 2024);
 - 4) Implementasi RUNK LLAJ Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang Melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah, Jakarta (Maret 2024);
 - 5) FGD RPM Tentang Standar Perlengkapan Jalan Pada Perlintasan Sebidang Antara Ruas Jalan Dengan Jalur Kereta Api, Bandung (9-11 Juli 2024);
 - 6) FGD Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana dan Prasarana Transportasi Umum, Jakarta (24-26 Juli 2024);
 - 7) FGD Transportasi Cerdas, Jakarta (1 Agustus 2024);
 - 8) Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Integrasi Transportasi di Wilayah Jawa Timur - Mojokerto, (4 Oktober 2024);
 - 9) Peningkatan Konektivitas dalam Rangka Menunjang Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) bersama Anggota Dewan Komisi V DPR RI di Toraja Utara (16 Juli 2024);
 - 10) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Untuk Menekan Angka Kecelakaan Bus Pariwisata, Solo (28 Mei 2024);
 - 11) Sosialisasi dan Koordinasi terkait dengan Diklat Khusus Analisis Kebijakan (16 Februari 2024);
 - 12) FGD Evaluasi dan Capaian Kinerja Sub Sektor Transportasi Darat Periode 2015 – 2024 Series 1 "Evaluasi Capaian Kinerja Transportasi Darat", Universitas Indonesia (10 September 2024);
 - 13) FGD Evaluasi dan Capaian Kinerja Sub Sektor Transportasi Darat Periode 2015 – 2024 Series 2 dengan tema: Evaluasi Capaian Kinerja Transportasi Darat, Universitas Indonesia (26 September 2024);
 - 14) Seminar Nasional Expert Talk Capaian Sektor Transportasi Udara 2015-2024, Institut Teknologi Bandung (25 September 2024);
 - 15) Meningkatkan Keselamatan Penerbangan dengan Menumbuhkan Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) yang Kompetitif, Tangerang (22 Agustus 2024);
 - 16) FGD Evaluasi dan Capaian Kinerja Sub Sektor Transportasi Laut Periode 2015 – 2024, Institut Teknologi Sepuluh November (11 September 2024);
 - 17) Seminar Evaluasi dan Capaian Kinerja Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian Periode 2015 – 2024 Series 1 dengan Tema "Kereta Perkotaan dan Kereta Bandara", Universitas Gadjah Mada (21 Agustus 2024);
 - 18) Evaluasi dan capaian kinerja sub sektor transportasi perkeretaapian periode 2015 – 2024 Series 2 dengan Tema "Kereta Antar Kota dan KA Logistik", Universitas Gadjah Mada (29 Agustus 2024);

- 19) Evaluasi dan capaian kinerja sub sektor transportasi perkeretaapian periode 2015 – 2024 Series 3 dengan Tema "Inovasi dan Alih Teknologi serta Kesiapan SDM Perkeretaapian", Universitas Gadjah Mada (5 September 2024);
- 20) Workshop Analis Kebijakan dengan Tema "Mewujudkan Analis Kebijakan Yang Profesional, Handal dan Berkualitas Untuk Indonesia Maju" (18 Januari 2024);
- 21) FGD Seminar Evaluasi dan Capaian Kinerja Sub Sektor SDM Transportasi Periode 2015 – 2024 "Membangun Talenta Unggul sebagai Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045", Universitas Padjajaran (3 Oktober 2024);
- 22) Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam rangka "Peningkatan Peran dan Kinerja Analis Kebijakan melalui Pembentukan Forum Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan", Jakarta (28 November 2024).

c. Kegiatan koordinasi monitoring evaluasi antara lain:

- 1) Monitoring Pemanfaatan Hasil Studi T-2 Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan;
- 2) Monitoring Pemanfaatan Hasil Studi T-2 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- 3) Monitoring Pemanfaatan Hasil Studi T-2 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
- 4) Monitoring Pemanfaatan Hasil Studi T-2 Pusat Kebijakan Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
- 5) Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Jakarta-17 Juli 2024;
- 6) Rapat Koordinasi Teknis Badan Kebijakan Transportasi, Jakarta (8 Oktober 2024);
- 7) Rapat Konsolidasi Program Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, Palembang (20-21 Agustus 2024).

Dalam pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan pengidentifikasian kegiatan strategis, penajaman isu strategis, dan koordinasi perencanaan kebijakan untuk menjaring isu strategis aktual pada 16 Provinsi. Kegiatan ini melibatkan BKT sebagai *unit lead*, subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan, kementerian terkait, pemerintah daerah, user, operator, regulator, serta Lembaga legislatif.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	100	100	-	100

Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga belum ada realisasi pada 2022. Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 5 pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 telah mencapai target sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,00%**.

Realisasi sampai dengan tahun 2024 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 5, antara lain:

- Komitmen Pimpinan dan seluruh staf yang terlibat dalam pelaksanaan inventarisasi isu-isu transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian;
- Koordinasi secara masif pada seluruh tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, maupun tahap perumusan hasil;
- Partisipasi aktif dari stakeholder yang berkontribusi dalam penyampaian isu dan permasalahan aktual di setiap daerah.

Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan merupakan indikator baru setelah adanya transformasi kelembagaan maka hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepan yaitu standarisasi format output kegiatan, pemetaan secara lebih detail terkait rencana kegiatan, lokasi, maupun penanggung jawab agar isu dan permasalahan aktual yang terjadi di setiap daerah dapat dijaring secara optimal.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 5 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp8.442.204.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp6.419.001.248,- (76,03%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.023.202.752,-. Terdapat blokir anggaran dengan total Rp2.023.198.973 sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada Tahun Berjalan	8.442.204.000	6.419.001.248	2.023.202.752	76,03%
	Program Infrastruktur Konektivitas	8.442.204.000	6.419.001.248	2.023.202.752	76,03%
	a. Kegiatan Najian Prakarsa Strategis Badan Kebijakan Transportasi	740.124.000	740.123.631	369	100,00%
	b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Prioritisasi Pelaksanaan Program Kebijakan Transportasi	1.979.478.000	1.433.932.027	545.545.973*	72,44%
	c. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Manfaat Kebijakan Transportasi	887.984.000	887.982.408	1.512	100,00%
	d. Koordinasi Perencanaan Sistem Transportasi Wilayah Ibukota Negara Baru	181.656.000	181.656.000	-	100,00%
	e. Rapat Koordinasi Teknis Badan Kebijakan Transportasi	1.408.715.000	1.408.714.430	570	100,00%
	f. Analisa Indikator Makro Transportasi Nasional	1.477.653.000	-	1.477.653.000*	0,00%
	g. Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Transportasi	1.766.594.000	1.766.592.672	1.328	100,00%

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel

Pencapaian sasaran kegiatan tiga diwujudkan melalui 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2024	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	100,00
IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	85	100	117,65
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	90,2	90,39	100,21
IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	79,14	97,70
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	77	100	129,87
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	87	93	106,73
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	74	80,46	108,73

IKK 6: Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Kementerian. Pedoman tingkat maturitas SPIP ditetapkan melalui peraturan kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tingkatan level maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tingkatan Level Maturitas SPIP

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
0	Belum ada (dalam penataan)	$0 < \text{skor} < 1.0$	Belum memiliki kebijakan dan prosedur.
1	Rintisan	$1.0 < \text{Skor} < 2.0$	Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis. Namun masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan Pemantauan.

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN
2	Berkembang	2.0 < Skor < 3.0	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
3	Terdefinisi	3.0 < Skor < 4.0	Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan Terukur	4.0 < Skor < 4.5	Ada Praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5	Optimum	4.5 < Skor < 5	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan. Terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 meliputi aspek perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil. Hasil penilaian SPIP terintegrasi terdiri dari Nilai Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi terdiri dari Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK). Penilaian mandiri dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Setelah dilakukan penilaian mandiri, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan akan melakukan penjaminan kualitas terhadap nilai PM. Selanjutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas untuk melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan Penjaminan Kualitas maturitas SPIP Tahun 2024 terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan di Lingkungan Unit Eselon I Kementerian Perhubungan

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor		
			Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi BPKP
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000	2,000	1,800
2.	Struktur dan Proses	2	0,953	0,905	0,712
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	1,140	0,930	0,870
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	4,093	3,835	3,382
	Nilai MRI	3	4,181	3,847	3,034
	Nilai IEPK	3	3,790	3,000	2,000
	Kapabilitas APIP	3	3,000	3,000	-

Nilai realisasi tahun 2024 sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan tanggal 17 Mei 2024 Nomor UM.006/5/19/STJ/2024 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang kemudian dilakukan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *Quality Assurance (QA)* dan Pembinaan SPIP Kemenhub.

Simpulan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor PS.302/4/6/ITJEN/2023 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 14 Juni 2023 Inspektur Jenderal tanggal 21 Juni 2024 Nomor KP.904/3/10/ITJEN/2024 tentang Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PK SPIP) terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA. 2024 telah memenuhi target tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu pada level 3 (terdefinisi). Hasil evaluasi menunjukkan secara umum penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 dan hasil evaluasi menunjukkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,835** (level 3).

Hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas selanjutnya dilakukan evaluasi oleh BPK sehingga hasil Evaluasi Penilaian berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/LHP-194/D103/2/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yang menyatakan nilai Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar **3,382**. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh capaian kinerja untuk IKK 6 adalah sebesar **100%**.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 6 pada tahun 2024 yaitu sebesar 3 telah mencapai target level 3 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,00%**. Realisasi sampai dengan tahun 2024 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 6 yaitu:

- a. Badan Kebijakan Transportasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi.
- b. Telah melaksanakan sertifikasi manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi pada level pimpinan tinggi dan level pegawai terutama dalam menguasai teknik dan proses manajemen risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri, melakukan identifikasi risiko dan membuat Risk Register secara sederhana;
- c. Badan Kebijakan Transportasi dan setiap unit kerja Eselon II dibawahnya secara berjenjang telah bertanggung jawab penuh terhadap proses penilaian mandiri untuk mendukung penilaian di tingkat Kementerian.
- d. Melakukan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) sebagai upaya mendukung percepatan implementasi proses manajemen risiko di lingkup Kementerian Perhubungan.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki antara lain:

- a. Menyusun dan menyesuaikan *Standard Operating Procedure (SOP)* sesuai nomenklatur Badan Kebijakan Transportasi (saat ini masih menggunakan SOP Badan Litbang Perhubungan);
- b. Evaluasi dan monitoring secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian yang terintegrasi dalam kegiatan;
- c. Melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 6 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp298.530.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp280.768.100,- (94,05%) dengan sisa anggaran sebesar Rp17.761.900,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	298.530.000	280.768.100	17.761.900	94,05%
IKK 6	Program Infrastruktur Konektivitas	116.138.000	116.137.600	400	100,00%
	Sertifikasi Manajemen Risiko	116.138.000	116.137.600	400	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	182.392.000	164.630.500	17.761.500	90,26%
	Koordinasi Pengendalian Internal Perumusan Kebijakan	182.392.000	164.630.500	17.761.500	90,26%

IKK 7: Indeks Perencanaan BKT

Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

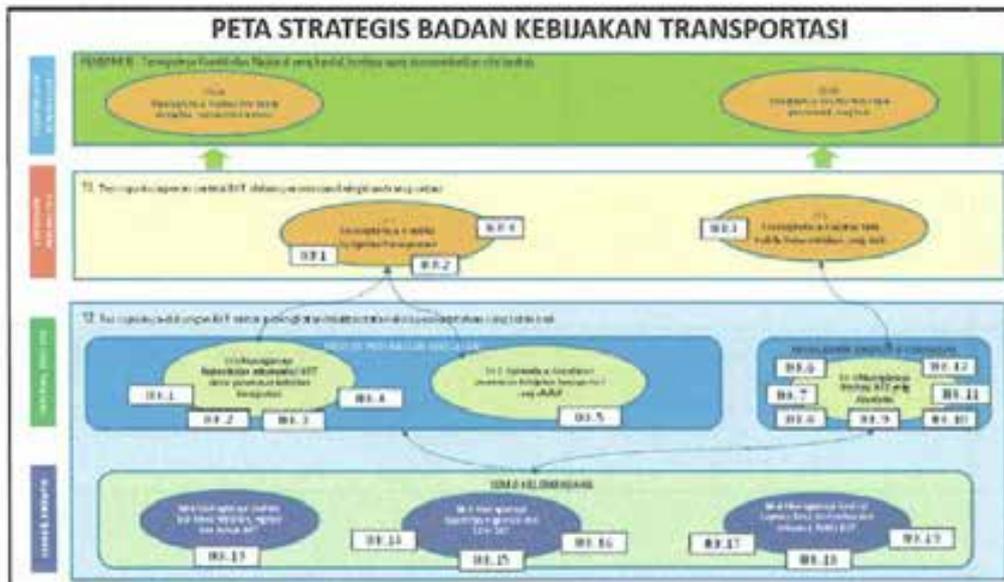
Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek Integrasi Perencanaan. Berikut tabel hasil perhitungan Indeks Perencanaan Tahun 2024:

Tabel 3. 10 Hasil Perhitungan Indeks Perencanaan

NO	ASPEK	Bobot	Nilai
A	Integrasi Perencanaan		
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra dengan sasaran Kementerian Perhubungan *)	20%	20%
2	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja dengan sasaran PN, dalam RKP	40%	40%
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja dengan sasaran Renstra **)	40%	40%
Total Integrasi Perencanaan			100%
<i>Keterangan:</i> *) diukur 1 kali dalam 5 tahun **) untuk mengukur Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi			

Berdasarkan tabel hasil perhitungan indeks perencanaan Badan Kebijakan Transportasi di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian IKK 7 ini adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi telah selaras dengan Sasaran Kementerian Perhubungan, hal ini dikarenakan Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan Sasaran Program Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan juga Sasaran Prioritas Nasional dalam dokumen RKP. Kesesuaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi dengan Sasaran Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi

- b. Dokumen penganggaran Badan Kebijakan Transportasi telah disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan pemrograman Badan Kebijakan Transportasi, sehingga sasaran program Badan Kebijakan Transportasi dalam dokumen Renja Badan Kebijakan Transportasi telah sesuai dengan sasaran yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan, pemrograman, dan penganggaran Badan Kebijakan Transportasi selalu memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi serta Badan Kebijakan Transportasi selalu berkoordinasi dengan instansi-intansi terkait dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut sehingga dokumen perencanaan terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- d. Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan penyesuaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada aplikasi KRISNA RENJA sehingga indikator pada aplikasi tersebut telah sesuai dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perencanaan BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	85	100	100	100	85

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 7 pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 telah melampaui target sebesar 85 sehingga capaian kinerjanya sebesar **117,65%**. Realisasi sampai dengan tahun 2024 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Dalam rangka menjaga konsistensi keselarasan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi maka perlu dilakukan *updating* dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Renja) jika terjadi perubahan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 7 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.183.527.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp2.183.516.057,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp10.943,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Perencanaan BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	2.183.527.000	2.183.516.057	10.943	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	1.313.370.000	1.313.370.673	7.327	100,00%
	a. Koordinasi Karya dan Kinerja Tahunan Rekomendasi Kebijakan	177.089.000	177.088.139	861	100,00%
	b. Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Program Tagging Kegiatan Prioritas Badan Kebijakan Transportasi	200.045.000	200.044.171	829	100,00%
	c. Assessment Indeks Kualitas Kebijakan	429.858.000	429.056.935	1.055	100,00%
	d. Penyusunan Executive Report dan Ensiklopedia Bidang Perencanaan Program Kebijakan Transportasi	506.386.000	506.381.428	4.572	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	870.149.000	870.145.384	3.616	100,00%
	a. Penyusunan Background Studi Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025 - 2029	446.213.000	446.210.059	2.941	100,00%
	b. Koordinasi Penyusunan Program, Rencana Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan	423.936.000	423.935.325	675	100,00%

IKK 8: Indeks Pengelolaan Keuangan BKT

Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlu dilakukan evaluasi kinerja anggaran dalam pengelolaan fiskal terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja atas Perencanaan Anggaran dengan bobot 50%;
Evaluasi kinerja anggaran merupakan suatu proses untuk melakukan, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya untuk

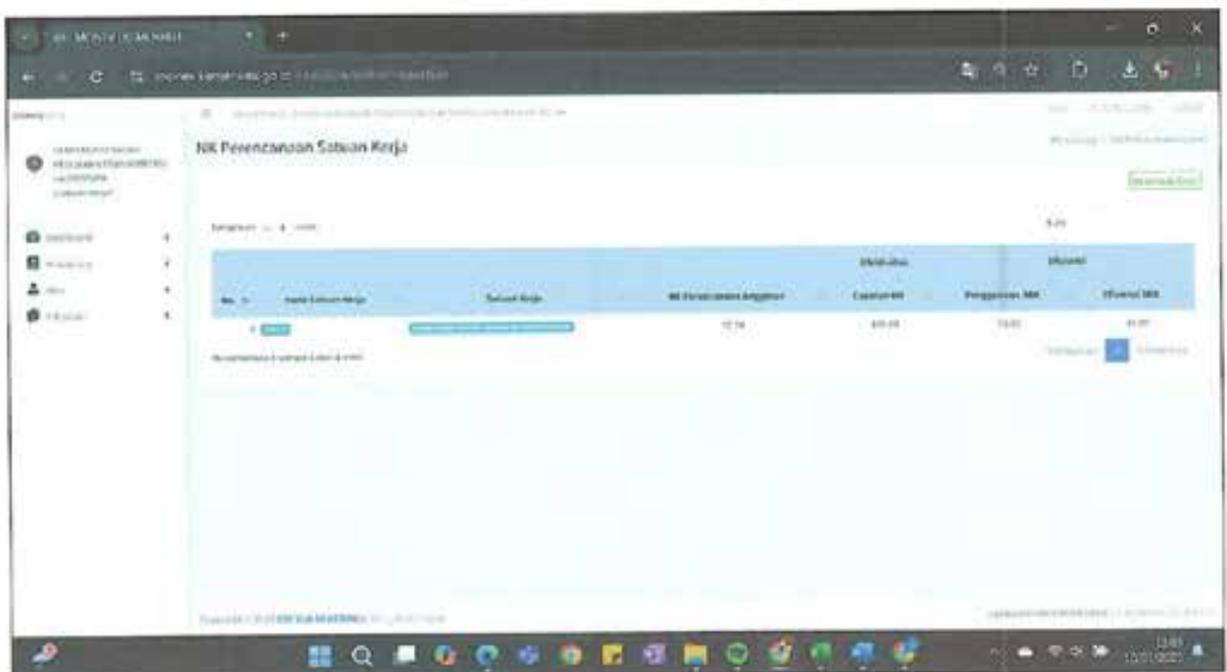
menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh nilai kinerja anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

- b. Nilai kinerja atas Pelaksanaan Anggaran atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%;

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil pengukuran Nilai kinerja atas Perencanaan Anggaran dan Nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan:

- a. Pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar 82,54 jika dikalikan dengan bobot 50% maka diperoleh skor untuk nilai kinerja anggaran sebesar 41,27.



Sumber : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

Perbandingan realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan target 2024, dan realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	90,2	90,39	90,50	92,28	90,20

Dapat dilihat pada tabel 3.12 bahwa angka realisasi untuk IKK 8 pada tahun 2024 yaitu sebesar 90,39 telah melampaui target sebesar 90,2 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,21%**.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 8 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp48.561.978.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp47.702.930.929,- (98,23%) dengan sisa anggaran sebesar Rp859.047.071,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan Keuangan BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	48.561.978.000	47.702.930.929	859.047.071	98,23%
	Program Infrastruktur Konektivitas	5.266.152.000	4.853.717.352	412.434.648	92,17%
	a. Pengawasan Kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	193.011.000	193.010.205	795	100,00%
	b. Konsolidasi dan Koordinasi Kegiatan Badan Kebijakan Transportasi	1.046.233.000	1.045.232.962	18	100,00%
	c. Konsolidasi Tindak Lanjut Arahan Menteri	3.310.045.000	2.090.411.553	412.633.447	87,54%
	d. Kajian Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan	716.063.000	716.062.612	388	100,00%
	Program Dukung Manajemen	43.295.826.000	42.849.213.577	446.612.423	98,97%
	a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	41.935.254.000	41.489.650.729	446.603.271	98,94%
	b. Penyusunan Laporan Triwulanan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (JKPA) Badan Kebijakan Transportasi	192.105.000	192.102.818	2.182	100,00%
	c. Pelaksanaan dan Pelaporan PIPK Badan Kebijakan Transportasi	155.614.000	155.013.870	130	100,00%
	d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	54.968.000	54.968.000	-	100,00%
	e. Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pelaksanaan Anggaran	303.477.000	303.475.370	1.630	100,00%
	f. Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Badan Kebijakan Transportasi	285.858.000	285.856.050	1.950	100,00%
g. Penyusunan Laporan Keuangan dan Workshop Peraturan dan Implementasi Aplikasi SAKTI	368.150.000	368.146.740	3.260	100,00%	

IKK 9: Nilai SAKIP BKT

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*).

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%;
3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%.

Tabel 3. 15 Interpretasi Penilaian Hasil Evaluasi SPIP

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan; telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>).
2	A	>80 - 90	Memuaskan; terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik; akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
4	B	>60 - 70	Baik; terlihat masih perlu adanya sedikit pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50 - 60	Cukup (memadai); masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No	Predikat	Nilai Angka	Interpretasi
6	C	>30 - 50	Kurang; sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang; sistem dan tatanan sama sekali tidak dapat diandalkan, sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar.

Nilai realisasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal pada bulan Juni s.d Juli 2024. Nilai realisasi sesuai Surat Itjen Nomor PS.302/7/2/ITJEN/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Badan Kebijakan Transportasi menyatakan bahwa di Lingkungan Badan Kebijakan transportasi dengan nilai **79,14 (Predikat BB)** dengan interpretasi **"Sangat Baik"** yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung yang ditandai dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.

Perbandingan realisasi indikator Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 9 Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	79,14	80,8	-	82

Nilai SAKIP BKT merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga belum ada realisasi pada tahun 2022. Realisasi untuk IKK 9 pada tahun 2024 yaitu sebesar 79,14 belum mencapai target sebesar 81 sehingga capaian kinerjanya sebesar **97,70%**. Realisasi sampai dengan tahun 2024 belum mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Faktor penyebab Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi tidak memenuhi target tahun 2024 karena adanya transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sehingga masih terdapat beberapa dokumen yang menggunakan redaksi Badan Litbang Perhubungan dan mempengaruhi beberapa aspek penilaian. Menindaklanjuti hal tersebut, di tahun 2024 dimana tahun akhir periode Renstra target pada Perjanjian Kinerja untuk IKK 9 Nilai SAKIP BKT disesuaikan menjadi 81.

Untuk meningkatkan Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi, maka hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian dokumen sesuai redaksi Badan Kebijakan Transportasi, meningkatkan upaya lebih baik lagi dalam pemenuhan data dukung penilaian SAKIP, dan pelaksanaan pemantauan capaian kinerja secara berkala agar sesuai target yang telah ditetapkan.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 9 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp721.602.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp721.600.594,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.406,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 17 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Nilai SAKIP BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	721.602.000	721.600.594	1.406	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	721.602.000	721.600.594	1.406	100,00%
	a. Koordinasi Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	721.602.000	721.600.594	1.406	100,00%

IKK 10: Indeks Pengelolaan BMN BKT

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai entitas pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, maka semua BMN dicatat dengan baik, semua aktivitas dalam pengelolaan BMN dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Indeks pengelolaan BMN BKT merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian Indeks Pengelolaan BMN BKT terdiri dari 2 indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%), rincian perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3. 18 Rincian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2024

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT	Nilai BKT	
1	Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya				
a	Lebih dari sama dengan 80%	1	50%	1	50,00
b	60% s.d. kurang dari 80%	0,80			
c	40% s.d. kurang dari 60%	0,60			
d	20% s.d. kurang dari 40%	0,40			
e	1% s.d. kurang dari 20%	0,20			
f	0% s.d. kurang dari 1%	0			
Total Tingkat Pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya = nilai (1) x bobot			50		50,00
2	Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN				
a	Laporan BMN Semester 1	1	50%	1	33,33
b	Laporan BMN Semester 2/Tahunan	1		1	33,33
c	Laporan Wasdal BMN (Semesteran/Tahunan)	2		2	33,33
Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = nilai (2) rata-rata x bobot			50		50,00
Indeks Pengelolaan BMN BKT = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan			Maksimal nilai = 100		100,00

Berdasarkan hasil penilaian sesuai indikator diatas, Badan Kebijakan transportasi telah menyusun Laporan Penetapan Status Pengguna Semester II T.A. 2023, Laporan Penetapan Status Pengguna Semester I T.A. 2024, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II TA 2023 dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I TA 2024.

Merujuk pada surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 386 2024 tanggal 28 Juni 2024 bahwa telah dilakukan penetapan status penggunaan BMN tahun 2024 secara keseluruhan sejumlah 114 unit berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sampai dengan Rp688.733.610,-.

Perbandingan realisasi indikator Indeks pengelolaan BMN BKT Tahun 2024 dengan target 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	77	100	100	76,8	77

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 10 pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 telah melampaui target tahun 2024 sebesar 77 sehingga capaian kinerjanya sebesar **129,87%**. Realisasi sampai dengan tahun 2024 telah mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian target IKK 10, antara lain:

- a. Badan Kebijakan Transportasi telah mengelola, menatausahakan dan melakukan pencatatan BMN dengan baik dituangkan dalam Catatan atas Laporan BMN yang disusun setiap semester dan tahunan;
- b. Melakukan rekonsiliasi berkala dengan seluruh satuan kerja dalam hal penggabungan data BMN dalam rangka tertib administrasi.

Langkah strategis yang akan dilakukan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN yang baik yaitu:

- a. Menginventarisasi BMN yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi;
- b. Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN untuk aset yang belum dilakukan penetapan status penggunaannya kepada KPKNL Jakarta I atau Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai batas kewenangan yang berlaku;
- c. Menelaah realisasi capaian di tahun ini untuk dipertimbangkan pada penetapan target indikator periode selanjutnya.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 10 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.909.552.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp4.909.511.967,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp40.033,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Pengelolaan BMN BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	4.909.552.000	4.909.511.967	40.033	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	321.977.000	321.975.500	1.500	100,00%
	a. Harmonisasi Penerapan Manajemen Aset	321.977.000	321.975.500	1.500	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	4.587.575.000	4.587.536.467	38.533	100,00%
	a. Penyusunan RKEMN di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	215.141.000	215.140.100	900	100,00%
	b. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL)	218.656.000	218.654.945	1.054	100,00%
	c. Penyusunan Laporan Brang Milik Negara TA. 2024	368.370.000	368.369.060	140	100,00%
	d. Penyusunan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	191.810.000	191.810.000	-	100,00%
	e. Penyusunan Usulan Penghapusan BMN di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	252.654.000	252.652.500	1.400	100,00%
	f. Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pengangkut Barang (Berubah menjadi Pengadaan Peralatan Podcast)	309.102.000	309.102.000	-	100,00%
	g. Pengadaan AC Cassette 5 PK	110.250.000	110.250.000	-	100,00%
	h. Pengadaan Inventaris Kantor	1.082.897.000	1.082.864.001	32.999	100,00%
	i. Pengadaan Furniture Custom Ruang Rapat	199.635.000	199.634.600	400	100,00%
	j. Pengadaan Peralatan Humas	145.577.000	145.576.500	500	100,00%
	k. Pengadaan Sound System Ruang Rapat	143.967.000	143.966.610	390	100,00%
	l. Pengadaan Lemari Arap Custom	6.000.000	6.000.000	-	100,00%
	m. Pengadaan Furniture Ruang Kerja Posjak Sarana	547.310.000	547.310.000	-	100,00%
n. Pengadaan Pekerjaan Interior Finishing Ruang Kerja Posjak Sarana	796.176.000	796.175.250	750	100,00%	

IKK 11: Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT

Perkembangan tantangan dan kendala yang dihadapi sektor transportasi akhir-akhir ini semakin besar ditambah dengan adanya tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, Badan Kebijakan Transportasi sebagai institusi yang membidangi analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi dituntut mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mudah diaplikasikan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan pihak lain ditunjang dengan sumber daya yang ada, serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Peran jejaring kerjasama dengan semua pihak yang terlibat sangat penting dalam proses perumusan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan implementatif dan mengusung nilai keadilan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa usulan rekomendasi kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan lebih lanjut.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam hal ini selaku koordinator kegiatan pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang perumusan rekomendasi kebijakan transportasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Di tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan empat Universitas, antara lain:

1. Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi antara BKT dengan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 6 Maret 2023 sesuai Surat Nomor HK.201/01/08/BKT/2023, 017/IT1.B07/KS.00/2023.

Tindak lanjut dari pendentangan nota kesepahaman ini yaitu:

- a. Kerja sama antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan Fakultas Teknologi Industri Tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Kerja Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara dengan Jangka Waktu Selama 9 (Sembilan) bulan;
 - b. Kerja sama antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Penentuan Kriteria Bandar Udara Pengumpul dan Pengumpulan untuk Optimalisasi dan Penguatan Jaringan Transportasi Udara dengan jangka waktu selama 9 (Sembilan) bulan.
2. Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi antara BKT dengan Universitas Hasanuddin pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai Surat Nomor HK.201/01/09/BKT/2023, 6603/UN4.1/HK.07/2023.

Tindak lanjut dari pendentangan nota kesepahaman ini yaitu:

- a. Perumusan Kebijakan terkait Angkutan Massal pada Kawasan Aglomerasi di Indonesia yang akan dilaksanakan dari 27 Februari s.d. 27 Mei 2023;
- b. Kesepakatan Kerja Sama Nomor LT.606/1/2/PKLLATP/2024, 11692/UN4.7.4/HK.07.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 antara Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Perkotaan dengan Pusat Teknologi Center of Technology Universitas Hasanuddin tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

3. Kesepakatan Bersama antara BKT dengan Angkasa Pura II pada tanggal 2 Agustus 2023 sesuai Surat Nomor HK.201/01/12/BKT/2023, PJJ.02.06/00/08/2023/0227.

Tindak lanjut dari pematangan nota kesepahaman ini yaitu:

Program Magang dalam rangka peningkatan kompetensi dan memperluas insight di PT. Angkasa Pura II Tahun 2023.

4. Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Kebijakan Bidang Transportasi antara Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub dengan Kompas Media Nusantara pada tanggal 9 Oktober 2023 sesuai Surat Nomor SOP-Setban 2 Tahun 2023, 202/AE-IKL/KP/X/2023.

Tindak lanjut dari pematangan nota kesepahaman ini yaitu:

Perjanjian Kerja Sama Nomor 201/AE-IKL/KP/X/2023 antara Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dengan PT Kompas Media Nusantara tentang Penyelenggaraan Analisis, Evaluasi Kebijakan, dan Publikasi Potensi Pergerakan Selama Masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

5. Kesepakatan bersama antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional pada tanggal 16 November 2023 sesuai Surat Nomor PJ.1529 Tahun 2023, 222/PKS/XI.2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tindak lanjut dari pematangan nota kesepahaman ini yaitu:

- a. Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.201/02/19/BKT/2024, 237/PKS/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (berlaku 3 tahun);
 - b. Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.201/02/20/BKT/2024, 238/PKS/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (berlaku 3 tahun);
6. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Universitas Padjajaran melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 25 Januari 2024 dengan nomor HK.201/01/03/BKT/2024, 62/UN6.RKT/HK.07.00/2024-MoU tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi antara Badan Kebijakan transportasi dengan Universitas Padjajaran.

Tindak lanjut dari pematangan nota kesepahaman ini yaitu:

- a. Kesepakatan Kerja Sama Nomor HK.201/01/24/BKT/2024, 011/SK-
PKS/MM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 antara Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan PT Mahat Masagi Universitas Padjajaran tentang Kajian Indeks Kualitas Kebijakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
- b. Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.201/02/03/BKT/2024, 1260/UN6.WR3/HK.07.00/2024-PKS SWA tanggal 31 Juli 2024 antara Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Padjajaran tentang Kajian Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Universitas Airlangga melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 2 Februari 2024 dengan nomor HK.201/01/05/BKT/2024, 31/UN3/HK.07.00/2024 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang transportasi antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Airlangga.

Tindak lanjut dari pendaratanganan nota kesepahaman ini yaitu adanya Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Kebijakan Sarana Transportasi dengan Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga Nomor HK.201/1/2/PKST/2024 dan 80/UN3/HK.07.00/2024 tentang Swakelola Tipe II Paket Pekerjaan Review Regulasi terkait Pelanggaran Pesawat Udara Tanpa Awak dibawah 25Kg di Indonesia yang berlaku selama 5 bulan.

8. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Universitas Andalas melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor HK.201/01/010/BKT/2024, B/11/UN16.R/HK.10.00/2024 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang transportasi antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Universitas Andalas.
9. Penandatanganan MoU antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Universitas Gadjah Mada melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor PJ.22 tahun 2014, 3418/P/HT/2014 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada.

Tindak lanjut dari pendaratanganan nota kesepahaman ini yaitu:

- a. Kesepakatan Kerja Sama Nomor HK.201/1/6/PKPTIM/2024, 83/UN1/PUSTRAL/PT/2024 tanggal 12 Februari 2024 antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Evaluasi Peran Program Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan jembatan Kargo Udara dalam Mendukung Pembangunan Prioritas Nasional di Pulau Papua;
- b. Kesepakatan Kerja Sama Nomor HK.201/1/5/PKPTIM/2024, 84/UN1/PUSTRAL/PT/2024 tanggal 12 Februari 2024 antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah IKN;
- c. Kesepakatan Kerja Sama Nomor HK.201/1/4/PKPTIM/2024, 85/UN1/PUSTRAL/PT/2024 tanggal 12 Februari 2024 antara Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrstruktur Bandar Udara;

- d. Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.201/01/18/BKT/2024, 409/UN1/PUSTRAL/PT/2024 tanggal 3 Mei 2024 antara Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada tentang Penyusunan National Transport Policy;
- e. Kesepakatan Kerja Sama Nomor LT.606/1/4/PKLLATP/2024 tanggal 8 Juli 2024 antara Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan dengan Direktorat Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Perumusan Kebijakan Pengembangan Transportasi Last Mile dan First Mile dalam Mendukung Tol Laut dan layanan Moda Utama dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Kerakyatan.
10. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Universitas Indonesia melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor PJ-MHB 2 Tahun 2024, 13/NKB/R/III/2024 tentang Penyusunan Kebijakan Bidang Transportasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
11. Penandatanganan MoU antara BKT dengan Universitas Diponegoro melalui nota kesepahaman Bersama pada tanggal 7 Juni 2024 dengan Nomor HK.201/01/19/BKT/2024, 114/UN7.A/KS/2024 tentang Perumusan Kebijakan dalam Pengembangan di Bidang Transportasi.
- Tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman ini yaitu adanya penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama Nomor HK.201/01/20/BKT/2024, 164/UN7.F3/KS/VI/2024 antara Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Perumusan Tata Kelola Organisasi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.
12. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BKT dengan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Pada tanggal 12 Agustus 2024 sesuai Surat Nomor HK.201/02/05/BKT/2024, R04.Ar.JK5/1225/2024 tentang Fasilitas Pembayaran Penghasilan Pegawai.
13. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai Surat Nomor PJ-MHB 5 Tahun 2024, 85/I/KS/10/2024 tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Bidang Transportasi.
- Tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman ini yaitu:
- Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.201/02/22/BKT/2024, 410/V/KS/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 antara Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dengan Kepala Pusat Ristek Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Riset dan Implementasi Sistem Cerdas Terintegrasi berbasis Pengetahuan untuk Mendukung Kebijakan Transportasi (berlaku 3 Tahun).
14. Kesepakatan Bersama antara BKT dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sesuai Surat Nomor HK.201/02/16/BKT/2024, S-458/KU-MTI/IX/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi.

15. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik sesuai Surat Nomor HK.201/02/23/BKT/2024, 19/HK.610/PKS/10/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 tentang Survei Potensi Pergerakan Masyarakat yang Melakukan Perjalanan untuk Penyusunan Rencana Operasi Angkutan Lebaran dan Angkutan Natal Tahun Baru dengan Memanfaatkan Aplikasi *Flexible and Authentic Survey Instrument Harmony dan Dashboard*.

Tindak lanjut dari pematangan nota kesepahaman ini yaitu:

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dan Badan Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Bidang Perhubungan Nomor PJ-159 Tahun 2022, 15/HK.610/12/2022 Tanggal 28 Desember 2022.

Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah Total Kerja Sama}} \times 100\%$$

Perbandingan realisasi indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	87	92,86	100	100	87

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 11 pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,86 telah melampaui target sebesar 87 sehingga capaian kinerjanya sebesar **106,73%**. Realisasi tahun 2024 telah melampaui di tahun 2024 maupun target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Faktor keberhasilan pencapaian pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT dengan melakukan komunikasi proaktif dan melaksanakan kunjungan langsung ke beberapa universitas di Indonesia untuk melakukan peninjauan potensi kajian yang bisa dikerjasamakan. Dalam pencapaian target indikator ini kedepannya perlu konsistensi dalam komunikasi dengan universitas dan instansi lain untuk menjangkau rencana kerja sama lainnya.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 11 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp557.916.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp557.913.577,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.423,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel 3.25.

Tabel 3. 22 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	557.916.000	557.913.577	2.423	100,00%
	Program Infrastruktur Kolektivitas	557.916.000	557.913.577	2.423	100,00%
	Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama	557.916.000	557.913.577	2.423	100,00%

IKK 12: Indeks Penyelenggaraan Perkantoran

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Badan Kebijakan Transportasi. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelayanan pengguna sarana dan prasarana perkantoran di gedung Kantor Badan Kebijakan Transportasi yang meliputi aspek sarana, prasarana, SDM, keselamatan dan keamanan gedung serta fasilitas lainnya yang tersedia di lingkungan kantor Badan Kebijakan Transportasi. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Kualitas pelayanan dinilai dari tingkat kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterjangkauan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Pengukuran indeks penyelenggaraan perkantoran dihitung dengan melalui survei yang dilakukan dengan pengisian kuesioner yang nantinya nilai kuesioner akan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%). Kuesioner yang digunakan untuk penilaian IKK 12 terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung dengan jumlah total pertanyaan sebanyak 88 pertanyaan.

Teknik pengambilan sampel responden menggunakan Rumus Slovin dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n = Sampel, N = Populasi, d = nilai presisi 90% atau sig.0,10

Responden dalam pengisian kuesioner ini terdiri dari dua kategori yaitu kategori internal yang merupakan pegawai Kementerian Perhubungan (termasuk pegawai Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan pengunjung lainnya) dan kategori eksternal yang pengunjung lainnya yang berkunjung ke kantor Badan Kebijakan Transportasi. Berikut tabel perhitungan pengambilan sampel responden:

Tabel 3. 23 Perhitungan Pengambilan Sampel Responden menggunakan Rumus Slovin dan Realisasi Responden

NO.	RESPONDEN	Badan Kebijakan Transportasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Unit Kerja Eselon 1 Lainnya	TOTAL RESPONDEN
1.	Pegawai Kementerian Perhubungan (ASN, PPNN, PPPK)	3	2	9	14
2.	Non Pegawai Kementerian Perhubungan	-	-	-	101
TOTAL		3	2	9	115

Analisis hasil survei dilakukan dengan menggunakan analisis Skala Likert yang merupakan salah satu bentuk skala yang digunakan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Skor Skala Likert dalam pengukuran IKK 12 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Skor Skala Likert

SKOR	JAWABAN
1	Tidak Baik
2	Kurang Baik
3	Cukup Baik
4	Baik
5	Sangat Baik

Dari seluruh data yang terkumpul, maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan jenis jawaban yang diperoleh setelah itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rumus = T \times P_n$$

T = Total jumlah responden yang memilih, P_n = Pilihan angka skor Likert

Setelah itu dilakukan pengukuran Skor Interpretasi yang harus terlebih dahulu diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden} \quad X = \text{Skor Terendah} \times \text{Jumlah Responden}$$

Langkah terakhir, untuk mengetahui kesimpulan dari hasil survei adalah dengan menghitung Skor Interpretasi responden yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (\%)} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100\%$$

Tabel 3. 25 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran dengan Analisis Skala Likert

SKOR	JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI (Y)	SKOR TERENDAH (X)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) x (3)	(5)	(6)
1	Tidak Baik	232	232	Y = 5 x 7733	X = JUMLAH SKOR LIKERT x Y
2	Kurang Baik	313	626		
3	Cukup Baik	1254	3762		
4	Baik	3182	12728		
5	Sangat Baik	2752	13760		
TOTAL SKOR			31108	38665	80,46%

Setelah dilakukan perhitungan indeks, perlu dilakukan pengukuran interval (rentang jarak) dan interpretasi persentase dengan metode mencari Interval Skor Persen (I) dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh hasil Interval Skor Persen yaitu sebesar 20 yang interval jaraknya dari terendah sebesar 0% hingga tertinggi sebesar 100%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$I = \frac{100}{5} = 20$$

Dari pengukuran interpretasi skor di atas, diperoleh hasil berdasarkan interval adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Interval Interpretasi Skor

SKOR	JAWABAN
0% - 19,99%	Tidak Baik
20% - 39,99%	Kurang Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
60% - 79,99%	Baik
80% - 100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel perhitungan di atas diperoleh realisasi untuk IKK 12 sebesar 78,94 dengan interpretasi skor "**Baik**", telah melampaui target ditahun 2024 sebesar 73 sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator indeks penyelenggaraan perkantoran sebesar 108,14%.

Secara rinci penilaian indkes penyelenggaraan perkantoran dari tiap aspek penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 27 Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Masing-masing Aspek Penilaian

NO.	ASPEK	JUMLAH SKOR LIKERT	SKOR TERTINGGI	INDEKS (%)	INTERPRETASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)
1	Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran	19117	23730	80,5605%	Baik
2	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	9220	11485	80,2786%	Baik
3	Aspek Keselamatan dan Keamanan Gedung	2771	3450	80,3188%	Baik
TOTAL SKOR		31108	38665	80,46%	80,46%

Perbandingan realisasi indikator Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 dapat dilihat [ada Tabel 3.30.

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	74	80,46	78,94	76,44	74

Dapat dilihat pada tabel 3.31 bahwa angka realisasi untuk IKK 12 pada tahun 2024 yaitu sebesar 80,46 telah melampaui target sebesar 74 sehingga capaian kinerjanya sebesar **108,73%**. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2024 telah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Komitmen tinggi Badan Kebijakan Transportasi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkantoran dengan tersedianya sarana dan prasarana di kantor Badan Kebijakan Transportasi yang memadai dan secara berkala rutin dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya, sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan dengan semestinya. Selain itu Badan Kebijakan Transportasi selalu melakukan *update* sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan perubahan teknologi;
- b. Badan Kebijakan Transportasi secara rutin melakukan pengarahan dan evaluasi kinerja kepada SDM pelaksana penyelenggaraan perkantoran, serta mengadakan peningkatan kapasitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana Badan Kebijakan Transportasi yang mendukung keselamatan dan keamanan para pengguna.

Badan Kebijakan Transportasi akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan oleh para responden dalam pengisian kuesioner survei indeks penyelenggaraan perkantoran.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 13 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp22.529.088.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp22.528.378.665,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp709.335,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 29 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	LAPANGAN REALISASI
IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	22.529.088.000	22.528.378.665	709.335	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	22.529.088.000	22.528.378.665	709.335	100,00%
	a. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Petugas Keamanan, Kebersihan, Pengemudi dan Teknisi di Gedung Merdeka Timur	603.664.000	603.663.171	829	100,00%
	b. Workshop Petugas Keamanan, Kebersihan, Pengemudi dan Teknisi di Gedung Merdeka Timur	290.264.000	290.262.736	1.264	100,00%
	c. Pelaksanaan Satuan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban Gedung (PKG)	342.610.000	342.607.590	2.410	100,00%
	d. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	6.553.409.000	6.552.712.110	696.890	99,99%
	e. Langganan Daya dan Jasa	5.882.118.000	5.882.115.709	2.291	100,00%
	f. Pemeliharaan Kantor	7.917.044.000	7.917.838.849	5.151	100,00%
g. Pembayaran terkait Operasional Kantor	851.179.000	851.178.500	500	100,00%	

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT

Pencapaian sasaran kegiatan empat diwujudkan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 30 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK 2024	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 13 Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	100	100,00	100,00

IKK 13: Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan tata kelola kebijakan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam hal ini selaku penyiap bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan berkewajiban membuat NSPK untuk dijadikan pedoman agar tercipta sinergi antara unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Pengukuran persentase usulan pembentukan terhadap NSPK (tata kelola kebijakan internal BKT) dihitung dengan membagi jumlah realisasi NSPK yang dihasilkan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total keseluruhan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi menargetkan penyusunan penyusunan 10 NSPK.

Sampai dengan akhir Tahun 2024 telah selesai disusun sebanyak 2 Keputusan Menteri Perhubungan dan 3 Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi antara lain:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 134 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Perhubungan yang disahkan pada 13 Maret 2024;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Logo Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor SK-BKT 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang disahkan pada 5 April 2024;
4. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor SK-BKT 55 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring Kebijakan Penurunan Harga Tiket Pesawat Udara pada Masa Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;
5. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BKT 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2025-2029.

Selain itu, telah disusun 2 Rancangan Peraturan Presiden dan 3 Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan. Naskah rancangan peraturan ini telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan Transportasi Nasional Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Transportasi Otonom di Indonesia;
3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Standar Keselamatan Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum;
4. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Sarana dan Prasarana Transportasi Umum;
5. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Standar Perlengkapan Jalan dan Tata cara Berlalu Lintas pada Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pemenuhan NSPK Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.33.

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	%	100	100	125	-	100

Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga belum ada realisasi pada 2022. Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 13 pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 telah mencapai target sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,00%**. Realisasi tahun 2024 telah mencapai target tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Faktor keberhasilan pencapaian pelaksanaan Tingkat Pemenuhan NSPK di Badan Kebijakan Transportasi karena *output* rekomendasi kebijakan yang mengarah ke NSPK ada lebih dari yang ditentukan dengan minimal terdapat naskah akademik atau naskah urgensi sehingga biaya yang dibutuhkan juga masih dapat diakomodir dengan anggaran yang tersedia. Dalam pencapaian target indikator ini kedepannya perlu konsistensi Analisis Kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan terkait regulasi.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 13 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.361.827.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp1.361.825441,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1.559,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel 3.34.

Tabel 3. 32 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Badan Kebijakan Transportasi	1.361.827.000	1.361.825.441	1.559	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	1.266.655.000	1.266.653.441	1.559	100,00%
IKK 13	a. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Pusat Kebijakan Transportasi	1.096.462.000	1.096.460.441	1.559	100,00%
	b. Monitoring dan Evaluasi Penyajian Rancangan Perumusan Kebijakan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	76.813.000	76.813.000	-	100,00%
	c. Koordinasi Penyusunan Legislasi Semu	91.380.000	91.380.000	-	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	95.172.000	95.172.000	-	100,00%
	Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	95.172.000	95.172.000	-	100,00%

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT

Pencapaian sasaran kegiatan lima diwujudkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 33 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET PK 2024	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	75	75,59	100,79
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	75	72,61	96,81
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,92	96,04

IKK 14: Indeks Kelembagaan BKT

Perhitungan indikator kinerja indeks kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Indeks dihitung berdasarkan hasil rata-rata survei pada instansi pemerintah dengan sampel dua tingkatan organisasi yakni tingkatan tertinggi dan tingkatan di bawah tingkatan tertinggi.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi kelembagaan, yaitu:

- Tersedianya rekomendasi untuk melaksanakan penataan organisasi;
- Salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Badan Kebijakan Transportasi.

Mengacu pada Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi kelembagaan dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap unit kerja Eselon II. Kuesioner yang disampaikan merupakan alat ukur yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan terkait evaluasi kelembagaan. Metode tahapan evaluasi kelembagaan meliputi:

- a. **Persiapan**
Pada tahapan ini adalah dilakukan penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan.
- b. **Pengumpulan Data Responden**
Responden yang melaksanakan pengisian kuisisioner evaluasi kelembagaan merupakan perwakilan dari setiap unit kerja Eselon II.
- c. **Pelaksanaan Pengisian Kuisisioner**
Pengisian kuisisioner dilakukan oleh setiap responden berdasarkan kondisi lingkungan organisasi masing-masing. Mekanisme pelaksanaan dapat menggunakan dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* melalui fasilitasi pengisian kuisisioner secara *online*.
- d. **Pengolahan Data: Penghitungan Nilai, Bobot dan Konversinya**
Analisis pengolahan data dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai, bobot dan konversinya berdasarkan Pedoman Evaluasi Kelembagaan yang telah ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Terdapat sebanyak 66 (enam puluh enam) pertanyaan instrumen yang dikelompokkan dalam dua dimensi dan delapan sub dimensi. Adapun setiap pertanyaan memiliki nilai jawaban yang menggunakan pendekatan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Untuk perhitungan nilai dari jawaban yang dipilih telah ditetapkan bobot untuk masing-masing dimensi sesuai PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai konversinya.
- e. **Pengkategorian Hasil Perhitungan**
Pengkategorian hasil perhitungan evaluasi dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan perhitungan nilai, bobot dan konversinya. Selanjutnya hasil perhitungan akhir disajikan menyeluruh dalam bentuk peringkat komposit (P). Peringkat komposit menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima) kategori sebagaimana ditetapkan dalam PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Rentang nilai peringkat komposit berikut interpretasi dari setiap peringkat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81 - 100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61 – 80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41 – 60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21 – 40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0 – 20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

Berdasarkan hasil pengisian kuisioner A2, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memperoleh total nilai sebesar 75,59 yang diperoleh dari total nilai Dimensi Struktur dan Dimensi Proses Organisasi. Perolehan total skor nilai 75,59 mendudukan BKT berada pada peringkat komposit P-4 yang mengindikasikan bahwa organisasi BKT dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif, memiliki kemampuan mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan

mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun tercatat masih terdapat beberapa kelemahan minor yang perlu segera diatasi melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Kelembagaan Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi Tahun 2024, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	75	75,59	75,59	-	80

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 14 pada tahun 2024 yaitu sebesar 75,59 belum mencapai target sebesar 79,5 sehingga capaian kinerjanya sebesar **95,08%**. Berdasarkan Peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat **3 (tiga) tahun sekali**. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan perubahan susunan organisasi Kemenhub yang awalnya terdapat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan saat ini menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Dengan adanya transformasi unit kerja ini, artinya organisasi Badan Kebijakan Transportasi **baru berdiri selama satu tahun** dan belum dapat dilaksanakan Evaluasi Kelembagaan.

Tetapi pada tahun 2024 Kementerian Perhubungan perlu melaksanakan evaluasi kelembagaan sehingga organisasi dibawahnya juga diarahkan untuk melaksanakan Evaluasi Kelembagaan. Oleh karena itu, di tahun 2024 sesuai arahan tersebut BKT ikut melaksanakan Evaluasi Kelembagaan walaupun baru berdiri selama satu tahun. Menindaklanjuti hal tersebut, Evaluasi Kelembagaan berikutnya akan dilaksanakan kembali dengan periode 3 tahun mendatang yaitu pada tahun 2026. Hal ini menyebabkan realisasi Indeks Kelembagaan BKT tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk perbaikan dalam penilaian Indeks Kelembagaan antara lain:

- a. Menyusun ulang seluruh proses bisnis dalam bentuk SOP meliputi kegiatan kebijakan dan kegiatan dukungan manajemen;
- b. Menyusun sistem kerja baru sesuai Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 sehingga memberikan kejelasan kewenangan dari setiap jabatan serta lingkup tanggung jawabnya masing-masing melalui pelaksanaan pekerjaan oleh kelompok kerja.
- c. Menindaklanjuti peraturan PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 yaitu Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali, maka nilai kelembagaan yang diperoleh saat ini akan digunakan selama 3 tahun sehingga untuk mengakomodir permasalahan ini di tahun 2024 dimana tahun akhir periode Renstra target pada Perjanjian Kinerja untuk IKK 14 Indeks Kelembagaan BKT disesuaikan menjadi 75.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 14 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.468.260.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp1.468.251.410,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp8.590,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 36 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Kelembagaan BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 14	Indeks Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi	1.468.260.000	1.468.251.410	8.590	100,00%
	Program Infrastruktur Konktivitas	1.158.712.000	1.150.709.418	2.502	100,00%
	a. Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Penyusunan Kebijakan	688.261.000	688.260.258	742	100,00%
	b. Konsolidasi Percepatan Sinerji Penyusunan Kebijakan	470.451.000	470.449.160	1.840	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	309.548.000	309.541.992	6.008	100,00%
	a. Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi	309.548.000	309.541.992	6.008	100,00%

IKK 15: Indeks Profesionalisme ASN BKT

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN telah diatur dalam peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh ASN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2024. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

- Pegawai ASN, dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
- Instansi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; dan
- Masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN ini berdasarkan 4 (empat) dimensi, yang disetiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN, yaitu antara lain:

- Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Indikator yang digunakan adalah jenjang Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi: Pendidikan S-3 (Strata Tiga), S-2 (Strata Dua), S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat), D-III (Diploma Tiga), D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, di bawah SLTA.

- b. Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.
- c. Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- d. Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, dan Hukuman disiplin berat.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91- 100;
- b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;
- c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80;
- d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; dan
- e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

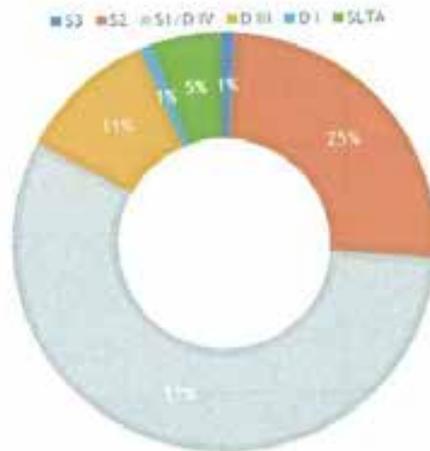
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui [link https://ip-jasn.bkn.go.id/](https://ip-jasn.bkn.go.id/) dengan target triwulan sebesar 74. Pengukuran Indeks ini dilakukan **setahun sekali yaitu pada akhir tahun berjalan**. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi dalam hal mendukung ketercapaian indikator ini adalah dengan melakukan updating data kepegawaian pada aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN perihal data:

- a. Pendidikan Terakhir Pegawai;
- b. Kompetensi Pegawai;
- c. Kinerja Pegawai; dan
- d. Disiplin Pegawai.

Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan penilaian mandiri untuk Indeks Profesionalitas ASN kepada seluruh pegawai Badan Kebijakan Transportasi. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Indeks Profesionalitas ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 adalah sebesar 73,88. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN didapatkan dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator ini, antara lain:

- a. Tingkat Pendidikan pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang sebagian besar telah berada pada jenjang Pendidikan S-2 (Strata Dua) dan S-1 (Strata Satu), yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, 2025

Gambar 3. 4 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi

- b. Pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang setiap tahunnya selalu berpartisipasi aktif atau ikut serta dalam pengembangan kompetensi baik dalam bentuk Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya. Selain itu Badan Kebijakan Transportasi juga secara rutin setiap tahun menyelenggarakan berbagai Pendidikan dan Pelatihan untuk diikuti oleh pegawai Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat;
- c. Kinerja pegawai Badan Kebijakan Transportasi yang berdasarkan pada penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) rata-rata berada pada kriteria Sangat Baik dan Baik.

Perbandingan realisasi indikator Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	75	73,88*	75,04*	81,76*	75

Keterangan*: Realisasi merupakan hasil penilaian mandiri

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 15 pada tahun 2024 yaitu sebesar 73,88 telah melampaui target sebesar 75 sehingga capaian kinerjanya sebesar **98,50%**. Realisasi tahun 2024 belum mencapai target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024.

Realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan penambahan jumlah pegawai yang cukup banyak setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan kuota diklat yang tersedia (saat ini masih terbatas). Selain itu juga karena jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu di Badan Kebijakan Transportasi tidak banyak sehingga nilai yang diperoleh dari bobot diklat fungsional sedikit.

Dalam upaya peningkatan indeks profesionalisme ASN, pada tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi telah memaksimalkan penyelenggaraan diklat teknis, maupun program pelatihan lainnya sesuai jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.

Diklat maupun pelatihan yang telah diselenggarakan di tahun 2024 antara lain:

1. Diklat *English For Business* Kampung Inggris, 22 s.d 26 Januari 2024
2. Diklat Keudaraan Tk. Sarjana bekerja sama dengan Poltekbang Surabaya, 13 s.d. 14 Maret 2024;
3. Diklat *Remote Pilot Rating* SPUKTA bekerja sama dengan BP3 Curug, 19 s.d 23 Februari 2024;
4. Diklat *Legaslitve Drafting* bekerja sama dengan LPPIA UI, 18 s.d 21 Maret 2024;
5. Diklat *Contract Drafting* bekerja sama dengan LPPIA UI, 25 s.d 28 Maret 2024;
6. Diklat Komunikasi Persuasif bekerja sama dengan Biro Psikologi Psikodinamika, 22 s.d 23 April 2024;
7. Diklat dan Sertifikasi Manajemen Risiko dengan Skema QRMO bekerja sama dengan WAY Academy, 06 s.d 08 Mei 2024;
8. Diklat *Regulatory Impact Assessment* bekerja sama dengan LPEM FEB UI, 14 s.d 16 Mei 2024;
9. Diklat *Safety Management System* bekerja sama dengan Politeknik Penerbangan Medan, 26 Mei s.d 01 Juni 2024;
10. Bimbingan Teknis *Marine Surveyor* Bekerja Sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia, 23 s.d 26 Juli 2024;
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, 09 Agustus 2024;
12. Sosialisasi Pencantuman Gelar Akademik & Tugas Belajar di lingkungan BKT, 16 Agustus 2024;
13. *Capacity Building* Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi di Guci Tegal, 30 Okt s.d 01 Nov 2024.

Anggaran Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 15 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.112.760.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 2.112.754.538,- (99,99%) dengan sisa anggaran sebesar Rp5.462,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 38 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Profesionalisme ASN BKT Tahun 2024

BK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN Badan Kebijakan Transportasi	1.519.033.000	1.519.031.104	1.896	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	942.690.000	942.589.050	950	100,00%
	a. Penyelenggaraan Kegiatan Temu Karya Analisis Kebijakan	366.220.000	366.227.250	750	100,00%
	b. Hub Award Tahun 2024	576.462.000	576.461.800	200	100,00%
	Program Dukung Manajemen	576.343.000	576.342.054	946	100,00%
	a. Pembinaan Karir dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	366.457.000	366.456.054	946	100,00%
	b. Pengelolaan Kegiatan Konseling Pegawai	209.886.000	209.886.000	-	100,00%

IKK 16: Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi. Penilaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit.

Skor sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan, antara lain:

- Kurang dengan skor 1, jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan;
- Cukup dengan skor 2, jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- Baik dengan skor 3, jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
- Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.

Berikut ini tabel hasil perhitungan mandiri Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi:

Tabel 3. 39 Hasil Perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi

NO.	ASPEK	TOTAL BOBOT	BOBOT BKT
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai	40	40
2	Pengadaan Pegawai	40	40
3	Pengembangan Karir Pegawai	130	100
4	Promosi dan Mutasi Pegawai	40	40
5	Manajemen Kinerja Pegawai	80	80
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin Pegawai	40	40
7	Perlindungan dan Pelayanan Pegawai	16	16
8	Sistem Informasi Pegawai	24	22
JUMLAH		410	410
INDEKS TATA KELOLA MANAJEMEN ASN: Jumlah Bobot / Jumlah Total Bobot			0,92

Perbandingan realisasi indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,92	0,96	0,93	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan tahun 2024 telah belum mencapai target 2024 yaitu sebesar 0,96 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 96,04%.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai sampai dengan tahun 2024 belum dapat tercapai, Badan Kebijakan Transportasi telah bekerjasama dengan Angkasa Pura 2 terkait magang namun belum terealisasi;
- Panduan penyelenggaraan *coaching* dan *mentoring* di lingkungan BKT namun belum disahkan;
- Dalam mendukung ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan, dokumen Standar Kompetensi Jabatan JPT Pratama dan Jabatan Administrator telah disampaikan kepada Biro SDMO, namun untuk SKJ jabatan JFT maupun JFU masih menunggu arahan dari Biro SDMO.

Namun, Badan Kebijakan Transportasi telah mengupayakan untuk memaksimalkan capaian pada indikator ini dengan secara rutin selalu melakukan pembaharuan data pegawai yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi selain itu Badan Kebijakan Transportasi setiap tahun telah melakukan analisis beban kerja sehingga telah tersedia peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai Badan Kebijakan Transportasi untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi No. 99 Tahun 2024 tentang kebutuhan PNS di Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020-2024.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 16 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5.509.320.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp5.509.309.581,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp10.419,-. Secara rinci dijelaskan pada Tabel 3.43.

Tabel 3. 41 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SMA	CAPAIAN REALISASI
IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Kebijakan Transportasi	5.509.320.000	5.509.309.581	10.419	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	4.408.452.000	4.408.446.151	5.849	100,00%
	a. Koordinasi Pengalokasian Sumberdaya Penyusunan Kebijakan	1.261.930.000	1.261.936.257	2.743	100,00%
	b. Pengorganisasian Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Kompetensi	2.899.741.000	2.899.730.834	2.166	100,00%
	c. Pengorganisasian Sumberdaya Penyusunan Kebijakan yang Efektif	256.772.000	256.771.060	940	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	1.100.868.000	1.100.863.430	4.570	100,00%
	a. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	667.520.000	667.523.430	4.570	100,00%
	b. Penyelenggaraan Administrasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional	256.712.000	256.712.000	-	100,00%
	c. Penyelenggaraan Pungsi Kotatuasahaan, Kearsipan dan Keprotokolalan	176.628.000	176.628.000	-	102,64%

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT

Pencapaian sasaran kegiatan enam diwujudkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK 2024	REALISASI	KINERJA (%)
IKK 17 Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	100	107,95	107,95
IKK 18 Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	93	100	107,53
IKK 19 Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	87,80	117,06

IKK 17: Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan

Perpustakaan Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari Badan Kebijakan Transportasi yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyebaran informasi. Berbagai layanan dan fasilitas disediakan oleh perpustakaan dan terus dikembangkan diantaranya Ruang baca yang nyaman, Layanan bimbingan perpustakaan dan layanan lainnya. Seiring perkembangan teknologi saat ini, Perpustakaan Kementerian Perhubungan juga menyediakan layanan online sebagai salah satu sarana untuk memudahkan pemustaka dan peneliti dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Salah satunya adalah OPAC (*Online Public Access Catalogue*). OPAC merupakan katalog *online* yang memberikan informasi tentang koleksi bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik yang ada di perpustakaan.

Perpustakaan Kementerian Perhubungan telah bersertifikat *ISO 9001:2015 dengan Certificate Regristration No. 16 001 19145*. Tersedianya layanan dan fasilitas di Perpustakaan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat mendukung kegiatan di bidang transportasi.

Indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan pada tahun 2024. Metode perhitungan IKK 17 ini yaitu jumlah pengguna layanan perpustakaan BKT selama satu tahun dibagi dengan target pengguna layanan. Penentuan bobot target pengguna layanan diusulkan 1.000 pengguna layanan setiap tahun.

Pada Triwulan IV, realisasi jauh telah melebihi target pengguna layanan karena adanya program terbaru dari BKIP yaitu terbitnya buku Ensiklopedia Transportasi Air Indonesia dan mengajak Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Jakarta Pusat untuk mengakses sehingga realisasi pengunjung di bulan November meningkat drastis sehingga terhitung Triwulan IV target pengguna layanan akan disesuaikan menjadi 6.000 pengguna. Rekapitulasi data pemanfaatan *E-library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 42 Rekapitulasi Data Pemanfaatan *E-library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan

No	Bulan	Page Views (halaman yang dilihat)	Visitor (pengunjung)	New Visitor (pengunjung baru)
1	Januari	392	160	118
2	Februari	250	130	98
3	Maret	297	160	141
4	April	310	159	144
5	Mei	249	168	146
6	Juni	1417	221	161
7	Juli	1137	338	208
8	Agustus	639	265	171
9	September	741	295	233
10	Oktober	340	178	139
11	November	6.089	4.313	4.283
12	Desember	136	90	74
Total		11.997	6.477	5.916

Berdasarkan tabel rekapitulasi data pemanfaatan *E-library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan, terdapat 6.477 pengunjung selama periode Januari s.d. Desember 2024. Dibandingkan dengan target pengguna layanan sebanyak 6.000 orang pertahun maka realisasi untuk Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan diperoleh realisasi IKK 17 sebesar 107,95.

Perpustakaan Kementerian Perhubungan menyediakan berbagai koleksi literatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas bertema transportasi dengan berbagai moda. Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan dihitung berdasarkan pengguna layanan Perpustakaan melalui *platform elibrary* Badan Kebijakan Transportasi (elibrary.dephub.go.id).

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	100	107,95	368,7	-	75

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 17 pada tahun 2024 yaitu sebesar 107,95 telah melampaui target sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya sebesar **107,95%**. Tingkat penggunaan layanan perpustakaan merupakan indikator baru sejalan dengan transformasi kelembagaan Badan Litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi sehingga tidak ada capaian pada 2022 dan belum ada referensi dalam penentuan target dan menimbulkan anomali *gap* karena tingginya angka realisasi di tahun 2023.

Selain itu, tingginya realisasi juga dikarenakan adanya transformasi digital dalam masyarakat pada masa pandemi sehingga semakin dituntut untuk menggunakan layanan digital dan semakin mudahnya dalam pencarian informasi. Sebagai solusi dan tindak lanjut untuk memperkecil *gap* antara target dan realisasi, maka di tahun 2024 target Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan dinaikkan menjadi 100% (tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024).

Keberhasilan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu:

1. Dalam rangka menunjang manajemen pengetahuan, pada tahun 2024 Baketrans berkolaborasi dengan BRIN untuk membangun *Knowledge Management System (KMS)*. KMS merupakan yang dikembangkan pada *E-Library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi serta pengetahuan secara sistematis. KMS memiliki manfaat utama dalam peningkatan efisiensi operasional dan kolaborasi antar unit, serta mendorong terbentuknya solusi transportasi yang lebih adaptif dan berbasis data. KMS dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya adalah *Knowledge Base*, *Prediksi Layanan Transportasi*, *Knowledge Base Chat*, dan *Analisis Sentimen Layanan*. KMS dapat diakses oleh publik melalui laman <https://elibrary.dephub.go.id/kms/publik>;
2. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional dalam rangka Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Perluasan jejaring perpustakaan dengan *Integrated Transport Resource Catalog* (ITRC) yang mengintegrasikan 28 perpustakaan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Sosialisasi PM Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Sertifikasi Pustakawan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 17 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp807.852.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp803.182.369,- (99,42%) dengan sisa anggaran sebesar Rp4.669.631,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 44 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	807.852.000	803.182.369	4.669.631	99,42%
	Program Dukungan Manajemen	807.852.000	803.182.369	4.669.631	99,42%
IKK 17	a. Penyusunan Kajian Knowledge Management System (KMS) Kementerian Perhubungan	380.706.000	380.704.269	1.731	100,00%
	b. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Koordinasi Perpustakaan	427.066.000	422.398.100	4.667.900	90,91%

IKK 18: Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif serta pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan aplikasi dan data sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan terkait analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.

Pada tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi melakukan pengembangan dan pembangunan aplikasi yang telah dimanfaatkan baik oleh internal maupun eksternal. Selain aplikasi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi juga telah menyusun data-data yang juga dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal.

Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data (IKK 18) ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan pengelolaan aplikasi dan data pada tahun 2024. Metode perhitungan IKK 18 ini yaitu jumlah aplikasi yang digunakan dibagi dengan jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dengan bobot 50% dan jumlah data yang dimanfaatkan dengan bobot 50%.

Berikut daftar aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada tahun 2024 serta daftar data yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi:

Tabel 3. 45 Daftar Aplikasi Tahun 2024

NAMA APLIKASI	MANFAAT	KETERANGAN
1. Aplikasi SIBIJAK (Sistem Informasi Kebijakan)	Aplikasi digunakan untuk mengelola data output dari Analisis Kebijakan yaitu berupa KTK dan KTI.	Digunakan
2. <i>Official Website</i>	Layanan Publik berbasis <i>website</i> untuk penyebaran media informasi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Baketrans seperti informasi kegiatan Berita Baketrans, <i>Event Forum Group Discussion</i> serta Infografis yang dapat di akses oleh masyarakat.	Digunakan
3. Aplikasi <i>E-Survey</i>	Aplikasi <i>E-Survey</i> merupakan aplikasi khusus dengan fungsi khusus sebagai dasar data yang dipakai oleh tim peneliti di Badan Litbang Perhubungan untuk merumuskan suatu analisa atau kebijakan strategis seperti Angkutan Lebaran dan Natal dan tahun baru.	Digunakan
4. Aplikasi SIDATA	Aplikasi digunakan oleh para pimpinan untuk memonitoring kegiatan, penyerapan anggaran, informasi kehumasan, SDM, Data KNKT.	Digunakan
5. Aplikasi <i>E-Library</i>	Digunakan untuk membantu pengelolaan koleksi buku dan peminjaman buku Perpustakaan.	Digunakan
6. Aplikasi <i>Open Journal System (OJS)</i>	Aplikasi digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian agar dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.	Digunakan

NAMA APLIKASI	MANFAAT	KETERANGAN
7. Aplikasi ATTN	Aplikasi ATTN Barang merupakan aplikasi khusus dengan fungsi sebagai media publikasi dan sosialisasi dari data yang dihasilkan dari survei ATTN Barang Tahun 2016.	Digunakan
8. Aplikasi SigapSiHati	Digunakan untuk user Baketrans untuk melakukan permohonan informasi dan pengaduan keluhan terkait layanan.	Digunakan

Tabel 3. 46 Daftar Data Produksi Tahun 2024

KEBUTUHAN DATA	UNIT YANG MEMINTA	KETERANGAN
Data Statistik Tahun 2023 Semester II	Pusdatin Kemenhub	Data Sudah Disampaikan (Selesai)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Pembuatan Bandar Udara Perairan (<i>Waterbase</i>) dan Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (<i>Seaplane</i>) di Pulau Gili Iyang, Pulau Senua dan Danau Toba 2. Harmonisasi Waterbase Airport dan Kebutuhan Wisata Kepulauan 3. Perwujudan Waterbase dalam mendukung konektivitas nusantara melalui kolaborasi anak bangsa (<i>Pentahelix</i>) 4. Pengaturan Pengoperasian Waterbase dan Seaplane di Indonesia 	Pusdatin Kemenhub	Data Sudah Disampaikan (Selesai)
Data Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Data terkait angkutan lebaran dan nataru 2022 dan 2023	Pusdatin Kemenhub	Data Sudah Disampaikan (Selesai)

Berdasarkan tabel daftar aplikasi dan data Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 di atas terdapat 14 aplikasi yang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2024, dari 14 aplikasi tersebut seluruhnya telah dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal sehingga realisasi untuk pemanfaatan aplikasi diperoleh sebesar 100% bila dikalikan dengan bobot 50% diperoleh realisasi sebesar 50% sedangkan untuk pemanfaatan data Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2024 sebesar 100% bila dikalikan dengan bobot 50% diperoleh realisasi sebesar 50%.

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	93	100	100	100	93

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 18 pada tahun 2024 yaitu sebesar 100 telah melampaui target sebesar 93 sehingga capaian kinerjanya sebesar **107,53%**. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi tahun 2024 sudah melampaui target di tahun 2024 yang merupakan tahun akhir renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Keberhasilan capaian pada indikator ini karena perencanaan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga seluruhnya dimanfaatkan.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 18 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.822.462.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp1.820.456.915,- (99,89%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.005.085,-. Secara rinci dijelaskan pada Tabel 3.50.

Tabel 3. 48 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	1.822.462.000	1.020.456.915	2.005.085	99,89%
	Program Infrastruktur Konektivitas	1.616.418.000	1.610.412.915	5.085	100,00%
	a. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	19.572.000	19.572.000	-	100,00%
	b. Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	106.544.000	106.544.000	-	174,04%
	c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi E-Survey dalam rangka Mendukung Survey Strategis Badan Kebijakan Transportasi	162.649.000	162.646.076	2.924	100,00%
	d. Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Informasi	567.412.000	567.410.904	1.096	86,10%
	e. Pengembangan Sistem Terintegrasi Single Sign On (SSO) Aplikasi Badan Kebijakan Transportasi	754.241.000	754.239.935	1.065	100,00%
	Program Dukungan Manajemen	212.044.000	210.044.000	2.000.000	99,06%
	a. Pengelolaan Portal Website	212.044.000	210.044.000	2.000.000	99,06%

IKK 19: Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Merupakan perhitungan kinerja berdasarkan prosentase perumusan kebijakan yang dipublikasikan baik berupa media, media sosial jurnal, keterbukaan/ kemudahan akses informasi maupun kanal publikasi lainnya. Perhitungan realisasi untuk indikator ini menggunakan bobot dari setiap jenis publikasi yang telah dilakukan. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi merupakan penanggung jawab publikasi jurnal transportasi.

Selain melalui jurnal terakreditasi hasil rumusan kebijakan juga dapat dipublikasikan melalui *website*, media sosial, media massa, media cetak maupun *online*. Perhitungan untuk indikator ini menggunakan sistem bobot yang diberikan pada masing-masing jenis publikasi penelitian, yaitu:

- Website* dengan bobot 25%;
- Pelayanan Informasi dan Pengaduan dengan bobot 5%;
- Pemberitaan Media Massa dan Media Sosial dengan bobot 50%;
- Jurnal Transportasi dengan bobot 25%.

Berdasarkan skor pembobotan tersebut telah dilakukan perhitungan untuk realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi, yaitu:

Tabel 3. 49 Skor Pembobotan Tingkat Publikasi

No	Indikator	Target Nilai	Bobot	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Website	100	konten	36	7,20%
	Pelayanan Informasi dan Pengaduan	4	laporan	4	5,00%
2	Pemberitaan Media Massa	250	artikel	477	37,86%
	Pengelolaan Media Sosial	380	konten	444	35,24%
3	Penerbitan Jurnal Transportasi	10	Artikel	1	2,50%
Total			100%		87,80%

Perbandingan realisasi indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi tahun 2024 dengan target 2024, realisasi 2 tahun sebelumnya, dan target di tahun akhir Renstra Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024, Realisasi 2 tahun sebelumnya, dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	87,80	92,32	70,73	75

Dapat dilihat pada tabel di atas angka realisasi untuk IKK 19 pada tahun 2024 yaitu sebesar 87,80 telah melampaui target sebesar 75 sehingga capaian kinerjanya sebesar **102,94%**. Beberapa faktor keberhasilan pada indikator ini antara lain:

1. Penerbitan jurnal transportasi di Badan Kebijakan Transportasi memiliki reputasi yang baik dan diakui secara nasional (akreditasi Sinta 2 dan Sinta 3);
2. Tersedianya tim publikasi yang kreatif dalam pelaksanaan setiap kegiatan dari penyiapan bahan dan materi, proses pengolahan hingga menjadi publikasi yang menarik dan terkini;
3. Komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi maupun Lembaga lain dalam rangka informasi dan publikasi.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung ketercapaian IKK 19 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.973.263.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp2.973.254.717,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp8.283,-. Secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 51 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi Tahun 2024

IKK	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	SISA	CAPAIAN REALISASI
IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	2.973.263.000	2.973.254.717	8.283	100,00%
	Program Infrastruktur Konektivitas	2.973.263.000	2.973.254.717	8.283	100,00%
	a. Penyelenggaraan Publikasi dan Koordinasi Peliputan Kegiatan Humas	748.154.000	748.151.974	2.026	100,00%
	la. Penyelenggaraan Media Relations	259.100.000	259.099.088	912	100,00%
	c. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kebijakan Transportasi	410.503.000	410.501.723	1.277	100,00%
	d. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	77.374.000	77.374.800	-	100,00%
	e. Pengelolaan Media Sosial	257.969.000	257.967.533	1.467	100,00%
	f. Penyelenggaraan Pengelolaan Publikasi Jurnal Transportasi	1.220.163.000	1.220.160.399	2.601	100,00%

III.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (BENCHMARKING)

Indikator Badan Kebijakan Transportasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja dengan unit kerja lainnya dikarenakan tidak ada indikator yang sama pada unit kerja lainnya yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, sehingga pada tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi hanya dapat melaksanakan benchmarking yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Benchmarking* antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023 dan Peraih SAKIP Award dari Kementerian PANRB dengan Predikat AA (Tertinggi) di Indonesia Tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan ini, antara lain:
 - a. Strategi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan AKIP yakni dengan mencermati hasil evaluasi Kementerian PAN RB dengan baik, terutama untuk catatan dan rekomendasi. Melakukan identifikasi OPD/Unit Kerja yang menjadi leading sector terhadap catatan dan rekomendasi. Melakukan rumusan tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi yang terjadwal untuk ditindaklanjuti. Berkoordinasi sampai tingkat pimpinan, untuk menguatkan komitmen para pihak, melakukan penguatan terusan-menerus dan berkesinambungan terhadap implementasi 4 pilar SAKIP. Pastikan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi serta upaya penguatan yang sudah dilakukan beserta bukti dukungnya dapat disampaikan kepada evaluator pada evaluasi tahun berikutnya;
 - b. Strategi implementasi SAKIP untuk penguatan reformasi Birokrasi melalui efisiensi dan efektivitas program kegiatan dan akuntabilitas anggaran dengan Perencanaan Kinerja pada Dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA Perjanjian Kinerja/SKP secara SMART, Outcome oriented dan konsisten antar dokumen. Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistem monev kinerja bulanan, triwulanan, semester, tahunan yang terkini dan terintegrasi. Pelaporan kinerja berupa laporan kinerja bulanan triwulanan, semester, tahunan dalam sistem monev disertai data dan bukti dukung yang memadai. Evaluasi kinerja dilakukan dengan sistem verifikasi atas validitas data kinerja yang dilaporkan, dan rekomendasi perbaikan kinerja;
 - c. Terdapat monitoring dan evaluasi performansi perorangan atau individu yang dilakukan oleh Pemprov DI Yogyakarta yakni melalui 5 langkah, antara lain:
 - 1) Langkah 1: Menyusun SKP sesuai DPA, Perjanjian Kinerja, Tusi, Tim Lintas Sektor. SKP harus *in line* dengan kinerja instansi dan kinerja atasan;
 - 2) Langkah 2: Targeting yang berupa target kuantitas, kualitas, tahunan, bulanan sesuai dengan ROPK dan Angkas;
 - 3) Langkah 3: Dialog Kinerja Atasan-Bawahan dilakukan untuk memastikan adanya pembinaan kinerja oleh atasan;
 - 4) Langkah 4: Performance Appraisal yakni berupa penilaian bulanan capaian target kuantitas dan kualitas oleh atasan;
 - 5) Langkah 5: Rewarding (TPP) diberikan berdasarkan capaian kinerja instansi kinerja individu dan kedisiplinan.

- d. Adapun ekosistem penyelenggaraan Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Roadmap RB sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara sistematis partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim RB Pemda, Tim RB OPD, Agen Perubahan OPD, Akademisi, Masyarakat dan Dunia Usaha serta Sekretariat RB Pemda (Biro Organisasi);
 - e. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan perlombaan dalam capaian kinerja pada SKPD melalui pemberian *reward and punishment* yang nantinya hasil perlombaan laporan kinerja perangkat daerah akan dibacakan di depan Gubernur dan dilakukan publikasi capaian kinerja. Hal ini sudah berlangsung selama 1 dekade dan kegiatan ini merupakan komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. *Benchmarking* antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan ini, antara lain:
- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki aplikasi mengenai pengelolaan SAKIP yang terintegrasi pada level kementerian sehingga lebih efektif dalam penerapan aplikasi;
 - b. Dalam Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat tim kerja yang bersertifikasi dengan penugasan resmi berupa surat keputusan pada level Eselon-1;
 - c. Perlu adanya atensi lebih dari pimpinan organisasi terhadap Penyelenggaraan SAKIP, sejalan dengan hal tersebut sekiranya SAKIP dapat menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Pimpinan;
 - d. Dalam pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan prinsip 5K yaitu: Keterlibatan pimpinan, Komitmen, Keselarasan Ketepatan waktu, dan Kolaborasi.

III.4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Efisiensi dari segi anggaran berdasarkan KMK 466 tahun 2023 tentang PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran melalui indikator yang meliputi:

1. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK); dan/ atau
2. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK).

Berdasarkan data pada aplikasi Monev kemenkeu, diperoleh nilai efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada variabel Nilai Penggunaan SBK sebesar 50 dan Nilai Efisiensi SBK sebesar 16,90 sesuai gambar berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	000000	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	82,54	100,00	50,00	16,90	

Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Gambar 3. 5 Nilai Efisiensi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sesuai Aplikasi SMART/ Monev Kemenkeu

Secara rinci, berikut ini merupakan perhitungan masing-masing variabel efisiensi penggunaan anggaran pada Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

1. Perhitungan Nilai Penggunaan SBK

No.	Unit	Sektor	Program	RO	Jenis SBK	Unsur SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/8	12
1	Badan Kebijakan Transportasi	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Program Dukungan Manajemen	MEMERINTAHKAN	SBK	Layanan BMN untuk Sektor Eksternal & Sertifikat (Jepang)	139.000.000	1.246.437.308	1,00	1.246.437.308	1,00
2	Badan Kebijakan Transportasi	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Program Dukungan Manajemen	MEMERINTAHKAN	SBK	Layanan Kebutuhan dan Informasi (Jepang)	458.000.000	427.865.095	1,00	427.865.095	1,00

Gambar 3. 6 Nilai Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai Aplikasi SMART/ Money Kemenkeu

Berdasarkan data tersebut, perhitungan penggunaan SBK dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SBK

$$= \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

$$Penggunaan SBK = \left(\frac{1}{2} \right) \times 100\% = 50\%$$

2. Perhitungan Nilai Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK).

No.	Unit	Sektor	Program	RO	Jenis SBK	Unsur SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVO	RVO	Indeks Realisasi Anggaran	Salah	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/8	13 = 9/12	14 = 13/5	15	16	
1	Badan Kebijakan Transportasi	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Program Dukungan Manajemen	MEMERINTAHKAN	SBK	Layanan BMN untuk Sektor Eksternal & Sertifikat (Jepang)	139.000.000	1.246.437.308	1,00	1,00	1.246.437.308	1.246.437.308	100	100	100	Tidak ada efisiensi (100%) Tingkat anggaran tercapai maksimal sesuai standar SBK.
2	Badan Kebijakan Transportasi	SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Program Dukungan Manajemen	MEMERINTAHKAN	SBK	Layanan Kebutuhan dan Informasi (Jepang)	458.000.000	427.865.095	1,00	1,00	427.865.095	38.124.905	9	9	9	

Gambar 3. 7 Nilai Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai Aplikasi SMART/ Money Kemenkeu

Berdasarkan data tersebut, perhitungan Efisiensi SBK dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = \left(\frac{30.934.905}{458.000.000} \right) \times 100 = 6,75$$

$$\text{Nilai Efisiensi per RO} = \left(\frac{0 + 6,75}{2} \right) = 3,75$$

$$\text{Nilai Efisiensi SBK} = \frac{E \text{ SBK}}{20\%} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi SBK} = \frac{3,5}{20\%} \times 100\% = 16,9\%$$

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada Satker terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NE Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Sehingga,

$$\text{NE Satker} = (40\% \times 50\%) + (60\% \times 16,9\%)$$

$$\text{NE Satker} = 30,14\%$$

Upaya efisiensi penggunaan anggaran lainnya adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang rapat utama Badan Kebijakan Transportasi. Pelaksanaan kegiatan dan forum sosialisasi sepanjang Triwulan IV Tahun 2024 sebagian dilaksanakan dengan memanfaatkan Ruang Rapat Garuda dan melalui daring atau webinar. Efisiensi operasional layanan perkantoran dalam hal ini juga dilakukan melalui pembatasan penggunaan listrik, dan telepon.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kecukupan alat perkantoran, ketersediaan fasilitas layanan internet, sistem data dan informasi yang terintegrasi serta peralatan pendukung lainnya telah cukup mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

III.5. REALISASI ANGGARAN

Perkembangan pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama rentang waktu tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3. 52 Perkembangan Anggaran Tahun 2020-2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2020	54.858.322.000	54.286.203.925	98,96
2021	45.843.217.000	45.831.591.266	99,97
2022	65.421.497.000	65.417.377.424	99,99
2023	74.845.333.464	74.854.518.000	99,99
2024	103.666.414.000	100.780.613.221	97,22



Gambar 3. 8 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020 – 2024

Selama kurun waktu lima tahun pagu anggaran tertinggi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar Rp74.854.518.000.- dan telah terealisasi sebesar Rp74.845.333.464,- atau 99,99% dari total rencana anggaran (DIPA) yang merupakan realisasi tertinggi selama kurun waktu tersebut. Secara rinci perkembangan daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

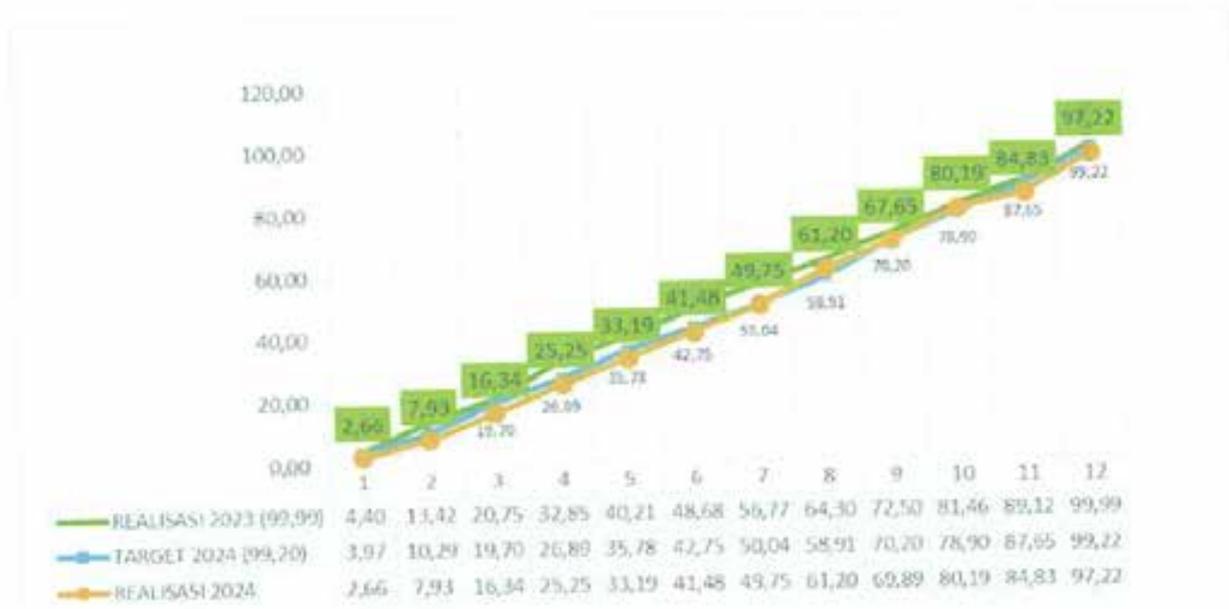


Gambar 3. 9 Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2020-2024

Penyerapan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 telah optimal. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan konsistensi antara jadwal rencana dengan realisasi kegiatan, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2024 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp 97.820.829.000,-. Pada bulan Juli dalam rangka optimalisasi kinerja anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 terdapat revisi anggaran pada anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 menjadi sebesar Rp103.666.414.000,-. Setelah pengesahan realokasi anggaran ke Babun, DIPA akhir Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp103.666.414.000,-. Rincian anggaran meliputi anggaran belanja pegawai sebesar Rp41.936.254.000,-, belanja barang Rp58.404.231.000,-, dan belanja modal sebesar Rp3.325.929.000,-.

Penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp100.780.542.221,- atau 97,22% dengan rincian realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp41.936.254.000,- (98,93%), belanja barang sebesar Rp58.404.231.000,- (95,82%), belanja modal Rp3.325.893.961,- (100,00%). Berikut gambar grafik perbandingan rencana penarikan dana revisi akhir dengan realisasi keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024:



Gambar 3. 10 Kurva S - Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

III.5.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 perolehan pagu anggaran revisi Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi adalah sebesar Rp 97.820.829.000,- dan direncanakan target daya serap sebesar 99,22%. Pada bulan Juli 2024 terdapat refocusing anggaran sehingga pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menjadi Rp103.666.414.000,- dengan realisasi daya serap anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebesar 97,22%. Kondisi pagu anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 53 Pagu Anggaran Per-Jenis Belanja Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.-)
Belanja Pegawai	41.936.254.000
Belanja Barang	58.404.231.000
Belanja Modal	3.325.929.000
Total	103.666.414.000

Sumber: Bagian Keuangan dan BMN, 2024

III.5.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap Tahun 2024

Capaian daya serap anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 tercatat sebesar 97,22% atau Rp100.780.542.221,- dan sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp2.885.871.779,- (2,784%). Realisasi daya serap Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 54 Capaian Daya Serap Kegiatan Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	PENYERAPAN
Belanja Pegawai	41.936.254.000	41.488.833.048	98,93%
Belanja Barang	58.404.231.000	55.965.815.212	95,82%
Belanja Modal	3.325.929.000	3.325.893.961	100,00%
Total	103.666.414.000	100.780.542.221	97,22%

Sumber: Bagian Keuangan dan BMN, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, pagu tidak terserap berasal dari Belanja Pegawai, yaitu sebesar 1,067% atau Rp 447.420.952,- dari pagu sebesar Rp 41.936.254.000,-. Dengan deviasi sebesar 1,067%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik, dan juga dapat disimpulkan bahwa besaran target dan realisasi cenderung sama. Adanya deviasi antara target dan realisasi belanja pegawai dikarenakan kenaikan tunjangan kinerja pegawai tahun 2024 tidak terealisasi.

Adapun untuk Belanja Barang telah terserap sebesar 95,82% dari pagu sebesar Rp 58.404.231.000,-. Terdapat deviasi sebesar 4,175% atau Rp 2.438.415.788,- dikarenakan adanya blokir anggaran sebesar Rp2.435.632.420,- sehingga tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

Belanja Modal telah terserap baik dengan daya serap sebesar 100,00% atau terserap sebesar Rp 3.325.893.961,- dari pagu Rp 3.325.929.000,-. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengadaan sarana dan prasarana dapat direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran.

Secara lengkap perkembangan pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi termasuk realisasi dan penyerapannya berdasarkan output kegiatan disajikan dalam Matriks Laporan Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 pada **Lampiran III**.

III.5.3. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Tahun 2024

Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2024 dalam mendukung ketercapaian IKK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, secara rinci dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3. 55 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			
	PAGU (Rp,-)	REALISASI (Rp,-)	SISA (Rp,-)	PROSENTASE REALISASI
IKK 5	8.442.204.000	6.419.001.248	2.023.202.752*	76,03%
IKK 6	298.530.000	298.519.360	10.640	100,00%
IKK 7	2.183.527.000	2.183.525.870	1.130	100,00%
IKK 8	48.561.978.000	47.702.930.929	859.047.071*	98,23%
IKK 9	721.602.000	721.600.594	1.406	100,00%
IKK 10	4.909.552.000	4.909.511.967	40.033	100,00%
IKK 11	557.916.000	557.913.577	2.423	100,00%
IKK 12	22.529.088.000	22.528.378.665	709.335	100,00%
IKK 13	1.361.827.000	1.361.825.441	1.559	100,00%
IKK 14	1.468.260.000	1.468.251.410	8.590	100,00%
IKK 15	1.519.033.000	1.519.031.104	1.896	100,00%
IKK 16	5.509.320.000	5.509.317.269	2.731	100,00%
IKK 17	807.852.000	807.840.836	11.164	100,00%
IKK 18	1.822.462.000	1.820.456.915	2.005.085	99,89%
IKK 19	2.973.263.000	2.973.254.717	8.283	100,00%

Ket: *terdapat blokir anggaran

III.6. CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Sebagai unit kerja pendukung kegiatan utama Badan Kebijakan Transportasi, sepanjang tahun 2024 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi senantiasa berusaha memberikan dukungan layanan manajemen dan manajemen teknis lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Beberapa capaian keberhasilan lainnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi di Tahun 2024 antara lain:

1. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mempertahankan predikat sebagai badan publik yang informatif, Kementerian Perhubungan.

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi meraih Predikat informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dengan Nilai 93,6. Penghargaan tersebut diterima pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan.



Gambar 3. 11 Penerimaan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

2. Peluncuran *E-Library* Terintegrasi dan Pembangunan *Knowledge Management System* (KMS)

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas informasi dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang transportasi serta memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi meluncurkan Integrasi *E-Library* dan Logo Perpustakaan Kementerian Perhubungan pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan pada tanggal 8 Oktober 2024.

Selain itu, Badan Kebijakan Transportasi berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun *Knowledge Management System* (KMS) untuk menunjang manajemen pengetahuan. KMS merupakan sistem yang dikembangkan pada *E-Library* Perpustakaan Kementerian Perhubungan yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi serta pengetahuan secara sistematis. KMS memiliki manfaat utama dalam peningkatan efisiensi operasional dan kolaborasi antar unit, serta mendorong terbentuknya solusi transportasi yang lebih adaptif dan berbasis data.

KMS dilengkapi dengan beberapa fitur, diantaranya adalah *Knowledge Base*, *Prediksi Layanan Transportasi*, *Knowledge Base Chat*, dan *Analisis Sentimen Layanan*. KMS dapat diakses oleh publik melalui laman <https://elibrary.dephub.go.id/kms/publik>.

Diharapkan, dengan adanya perpustakaan yang terintegrasi secara digital, proses penyebaran informasi dan pengetahuan menjadi lebih cepat dan mudah, terutama di sektor transportasi yang dinamis.



Gambar 3. 12 Peluncuran *E-Library* Terintegrasi

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Eselon II Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi kepada Badan Kebijakan Transportasi atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kebijakan Transportasi dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Secara umum pencapaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Capaian kinerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 untuk 15 (lima belas) indikator kinerja kegiatan didapatkan nilai capaiannya tahun 2024 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **105,92%**.

IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2024, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi secara dinamis telah melakukan perbaikan dengan mengedepankan koordinasi yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Beberapa identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi BMN yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi;
2. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/ integral dengan proses kegiatan lainnya;
3. Menelaah realisasi capaian di tahun ini untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan target indikator periode selanjutnya;
4. Menyusun dan menyesuaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai nomenklatur Badan Kebijakan Transportasi (saat ini masih menggunakan SOP Badan Litbang Perhubungan);
5. Menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP) Badan Kebijakan Transportasi untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya serta pengembangan SDM untuk membuka potensi SDM dalam meningkatkan kinerja;
6. Menyusun sistem kerja baru sesuai Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 sehingga memberikan kejelasan kewenangan dari setiap jabatan serta lingkup tanggung jawabnya masing-masing melalui pelaksanaan pekerjaan oleh kelompok kerja;
7. Menjadikan informasi dalam dokumen Laporan Kinerja sebagai sumber informasi untuk perbaikan dalam menentukan strategi pada periode berikutnya serta pertimbangan dalam penyusunan Renstra periode 2025-2029 yang memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Time Bound*, dan Cukup).

L A M P I R A N

Lampiran 1

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2024				CAPAIAN KINERJA
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
Terwujudnya peran sentral Sekretariat Badan dalam peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5 Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	13,33	35,56	37,78	100,00	100,00%
		IKK 6 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%
		IKK 7 Indeks Perencanaan BKT	Indeks	84	100,00	100,00	100,00	100,00	117,65%
		IKK 8 Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	88,2	30,00	60,50	71,37	90,39	100,21%
		IKK 9 Nilai SAKIP BKT	Nilai	81	80,80*	80,80*	79,14	79,14	97,70%
	SK 3 Meningkatnya Birokrasi BKT yang Akuntabel	IKK 10 Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	76	25,00	75,00	100,00	100,00	129,87%
		IKK 11 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	86	71,43	88,89	90,91	92,86	106,73%
		IKK 12 Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73	78,55*	80,61	80,61	80,46	108,73%

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2024				CAPAIAN KINERJA
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	95	16,00	31,00	42,50	100,00	100,00%
	IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	79,5	75,59	75,59	75,59	75,59	100,79%
	IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	74	81,76*	81,76*	81,76*	73,88	98,50%
	IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	0,96	0,96*	0,96*	0,96*	0,92	96,04%
SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	30,00	66,53	94,80	107,95	107,95%
	IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	92	85,71	87,50	100,00	100,00	107,53%
	IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	17,55	40,18	61,76	87,80	117,06%

*Nilai realisasi merupakan nilai realisasi di tahun sebelumnya karena belum dapat dilaksanakan perhitungan pada periode tersebut.

Lampiran 2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2024	TARGET PK 2024	REALISASI KINERJA			
						2021	2022	2023	2024
<p>Terwujudnya peran sentral Sekretariat Badan dalam peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi</p>	SK 2 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang diselenggarakan pada tahun berjalan	%	100	-	100,00	-	100,00
		IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3,00	3,00	3,00	3,00
	IKK 7	Indeks Perencanaan BKT	Indeks	85	100,00	100,00	100,00	100,00	
	IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan BKT	Indeks	90,2	87,85	92,28	90,50	92,28	90,39
	IKK 9	Nilai SAKIP BKT	Nilai	82	-	-	80,80	-	79,14
	IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN BKT	Indeks	77	76,25	76,80	100,00	76,80	100,00
	IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT	%	87	100,00	100,00	100,00	100,00	92,86
	IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	74	78,92	76,44	78,94	76,44	80,46

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2024	TARGET PK 2024	REALISASI KINERJA			
						2021	2022	2023	2024
SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BKT	IKK 13	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria BKT	%	100	-	-	125,00	-	100,00
						-	75,59	-	75,59
						81,76	75,04	81,76	73,77
SK 5 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan SDM BKT	IKK 14	Indeks Kelembagaan BKT	Indeks	80	-	-	75,59	-	75,59
						-	75,04	-	73,77
						81,76	75,04	81,76	73,77
SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 15	Indeks Profesionalisme ASN BKT	Indeks	75	82,60	81,76	75,04	81,76	73,77
						0,93	0,96	0,93	0,92
						0,93	0,96	0,93	0,92
SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 16	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BKT	Indeks	1	0,93	0,93	0,96	0,93	0,92
						0,93	0,96	0,93	0,92
						0,93	0,96	0,93	0,92
SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 17	Tingkat Penggunaan Layanan Perpustakaan	Nilai	75	-	-	368,70	-	107,95
						-	368,70	-	107,95
						-	368,70	-	107,95
SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 18	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Nilai	93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00	100,00
SK 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik BKT	IKK 19	Tingkat Pengelolaan Publikasi Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Nilai	75	97,53	70,73	92,32	70,73	87,80
						70,73	92,32	70,73	87,80
						70,73	92,32	70,73	87,80

Lampiran 3

REKAPITULASI REALISASI DAYA SERAP SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	JENIS BELANJA										TOTAL PAGU (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI		BARANG		MODAL		TOTAL PAGU (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)		
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)						
TRIWULAN I (PERIODE: JANUARI S/D MARET) TAHUN 2024													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	46.758.254.000	15.890.408.531	33,98%	48.386.646.000	21.088.902.029	43,58%	2.675.929.000	908.124.600	33,94%	97.820.829.000	37.887.435.160	38,73%
TRIWULAN II (PERIODE: APRIL S/D JUNI) TAHUN 2024													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	46.758.254.000	23.256.168.381	49,74%	48.386.646.000	20.372.585.272	42,10%	2.675.929.000	688.733.610	25,74%	97.820.829.000	44.317.487.263	45,30%
TRIWULAN III (PERIODE: JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2024													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	46.758.254.000	32.027.802.495	68,50%	54.232.231.000	36.933.424.289	68,10%	2.675.929.000	1.173.833.451	43,87%	103.666.414.000	70.135.060.235	67,65%
TRIWULAN IV (PERIODE: OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN 2024													
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	41.936.254.000	41.488.833.048	98,93%	58.404.231.000	55.965.815.212	95,82%	3.325.929.000	3.325.893.961	100%	103.666.414.000	100.780.542.221	97,22%